



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : II
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : Pukul 13.50 WIB s.d.16.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H. (F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Progres pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara
2. Progres realisasi program TA. 2023
3. Dan lain-lain
Hadir : 22 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

4 orang anggota dari 10 anggota:

1. Mercy Chriesty Barends, S.T.
2. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
3. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
4. Ribka Tjiptaning Ploretariyati

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Drs. H. M. Gandung Pardiman, S.M.
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 6 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
2. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
2. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

ANGGOTA YANG IZIN:

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H./F-PDIP
2. Drs. Mukhtarudin/F-PG
3. Drs. H. Anwar Idris/F-PPP

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ibu-Bapak bisa kita mulai ya, Pak Menteri bisa dimulai.

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua,
Selamat siang,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, dihadiri oleh Pak Sugeng, ada juga Pak Bambang Haryadi dan Pak Dony Oekon yang akan bergabung, Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, Yang kami hormati Menteri ESDM RI beserta jajarannya, serta Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa pada hari ini bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, serta Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya yang telah hadir dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan rapat kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan hari ini beragenda:

1. Progres pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara,
2. Progres realisasi program tahun anggaran 2023, dan
3. Lain-lain

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir berjumlah 15 Anggota dari 7 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum telah tercapai. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan Anggota Komisi VII agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Setuju? Baik. Atas persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**



Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII bahwa rapat ini selesai pada pukul, paling lambat pukul 16.00 atau 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan, tetapi kita usahakan rapat ini seefisien mungkin pada hari ini. Mengingat akan ada rapat berikutnya pada pukul 16.00 nanti, bisa disetujui ya Ibu-Bapak?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

Ibu-Bapak yang kami hormati.

Saat ini entitas khusus batubara akan dilaksanakan dalam bentuk Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara, dalam progresnya Komisi VII DPR RI memahami bahwa MIP Batubara menghadapi beberapa proses koordinasi dan pematangan lintas kementerian, di antaranya yang terkait perpajakan dan juga formula harga acuan batubara. Oleh karena itu kami berharap dalam rapat kerja ini kita mendapatkan penjelasan dari Menteri ESDM terkait progres terkini dan target rampungnya MIP Batubara tersebut.

Dalam kesempatan ini, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri ESDM terkait progres dari pelaksanaan program tahun anggaran 2023, khususnya program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat kerja ini, kami berikan kesempatan kepada Menteri ESDM RI untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan, Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak-bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati, serta Rekan-rekan dari lingkup Kementerian ESDM yang hadir pada siang hari ini, serta
Hadirin yang berbahagia,

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan amanah konstitusi yaitu rapat kerja, dengan agenda sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi.

1. Progres pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara, dan



2. Progres realisasi program tahun anggaran 2023, khususnya yang terkait dengan program-program strategis.

Perkenankan kami untuk menyampaikan agenda yang pertama yaitu progres pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara. Terkait dengan progres pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara, dana kompensasi batubara atau DKB kami sampaikan bahwa saat ini draf perpres sudah dalam tahap finalisasi. Menteri ESDM dan Menteri BUMN sudah melaksanakan pamarafan dan masih ada masukan baru dari Kemenko Marves yang kami koordinasikan dengan setneg. Kami hari ini sudah kami sampaikan masukan terakhir ke setneg.

Sementara dalam aturan turunan dan aplikasi pendukungnya sedang disiapkan, antara lain seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif dana kompensasi batubara, kemudian Permen, Kepmen, Juknis, tata cara pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara dan revisi Kepmen ESDM Nomor 58 Tahun 2022 terkait Harga Jual Batubara sebesar 90 dolar per ton untuk bahan baku, bahan bakar industri semen dan pupuk dalam negeri sesuai dengan isi perpres.

- Untuk itu diperlukan dukungan kementerian lembaga, antara lain:
- a. Percepatan penyelesaian PMK tarif dana kompensasi batubara,
 - b. Penyelesaian sistem aplikasi e-DKB termasuk jaringan dan keamanannya, dan
 - c. Percepatan pembangunan peringatan nilai tambah batubara jenis metalurgi.

Diharapkan jika hal tersebut di atas dapat diselesaikan uji coba dan sosialisasi implementasi MIP kepada pelaku usaha dapat dilaksanakan pada Bulan Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 sudah bisa dioperasionalkan.

Dalam hal pengelolaan DKB atau dana kompensasi batubara calon BMN yang akan ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran DKB yaitu 3 bank BUMN, yaitu: Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BRI. Seluruh calon MIP tersebut sepakat untuk menggunakan *dashboard* sistem yang di-*develop* oleh Bank Mandiri, sistem e-DKB dan sepakat tidak mencantumkan *leading bank*.

Kemudian pada saat pemungutan DKB tetap dikenakan kewajiban royalti, sedangkan pada saat penyaluran DKB pada pemasok batubara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN. Batubara *cooking coal* dikecualikan terhadap kewajiban MIP, namun tetap diwajibkan DMO sehingga masih perlu pengaturan terkait kewajiban denda dan kompensasinya atas kewajiban DMO tersebut.

Juknis alur kerja dan tanggung jawab antara instansi pengelola dan MIP secara detail akan diatur dalam rancangan permen, rancangan kepmen ESDM dan system e-DKB akan diintegrasikan dengan sistem e-PNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.



Demikian yang kami sampaikan terkait dengan agenda pertama MIP, kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan progres realisasi program APBN tahun anggaran 2023.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Penyerapan anggaran Kementerian ESDM sampai dengan 18 November 2023 mencapai 59,03%, masih terdapat deviasi minus 5,68%. Realisasi ini masih rendah terutama disebabkan pada kegiatan insentif konversi motor BBM ke motor listrik, di mana minat masyarakat yang masih rendah dan juga kegiatan penyediaan alat masak berbasis listrik atau ML baru dalam tahapan penyiapan data calon penerima dan penyiapan pengadaannya melalui e-katalog karena alokasi DIPA baru saja ditetapkan.

Namun demikian Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga diharapkan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2023 dapat mencapai 98,53%.

Dari 531 paket kegiatan strategis, 126 paket dilaksanakan dengan mekanisme tender atau seleksi dan 405 paket non-tender. Sebanyak 513 paket telah berkontrak, yaitu 125 paket tender dan 388 paket non-tender. Kami tetap berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh kegiatan yang belum tender dan belum berkontrak.

Sebagian anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur, pengelolaan survei sumber daya alam dan mitigasi bencana geologi dengan progres, antara lain sebagai berikut:

- Proyek pipa Cirebon-Semarang tahap 1, pembangunan jalur pipa telah selesai 100% dan *offtake station*-nya telah mencapai 93,65%,
- *Gas in* pipa Cisem tahap 1 ke Kawasan Industri Kendal telah dilaksanakan tanggal 17 November 2023 yang lalu,
- Kemudian untuk *converter kit*, *converter kit* nelayan telah terdistribusi 8.030 paket dari target 14.160 paket,
- Kemudian konkrit petani telah terdistribusi 34.920 paket dari target 39.465 paket,
- BBM satu harga telah dibangun 82 penyalur dari target 89 lembaga penyalur,
- Kemudian alat penyalur daya listrik Apdal telah diproduksi dan dikirim ke gudang **HAP** sebanyak 8.296 unit atau 100%,
- PLTS terpadu 2 unit sudah *on* beroperasi, 3 unit proses instalasi dan 5 unit pengiriman komponen, sekaligus dengan paralel pembersihan lahan,
- PJUTS telah terpasang di 7.355 titik dari target 31.075 unit, ini masih 20%,



- BPBL telah menyala 130.596 rumah tangga dari target 125.000 rumah tangga, diperkirakan akhir tahun akan terpasang 131.600 rumah tangga sampai dengan November 2023,
- Alat masak berbasis listrik (ML) status saat ini DIPA sudah terbit dan dalam penyiapan data calon penerima dan penyiapan pengadaan melalui e-katalog, diharapkan kontrak dapat dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan November 2023 sehingga distribusi dapat segera dilaksanakan sampai dengan pertengahan Desember 2023,
- Sistem mitigasi bencana geologi, realisasi 121 unit dari target 160 unit. Tambahan sampai dengan akhir November 2023 sebanyak 11 unit dan Desember sebanyak 28 unit.

Kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan seluruh kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan pada hari ini, selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya Pak Menteri ESDM.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi VII DPR RI untuk melakukan pendalaman, memberikan pertanyaan dan tanggapan sesuai dengan tata tertib mohon tanggapan pertanyaannya selama maksimal 5 menit.

Kami persilakan Fraksi PDI Perjuangan, oke baik. Kalau *gitu* lanjut Fraksi Partai Golkar, Pak Bambang.

Silakan.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Baik, terima kasih Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen dan seluruh jajarannya.



Yang pertama tentu saya ingin mengucapkan apresiasi Pak atas terealisasinya beberapa program di dapil kami, yang pertama konkrit nelayan Pak. Ini kebetulan di tempat kami banyak juga nelayan yang apa namanya kecil-kecil, jadi cukup merasa terbantu Pak tetapi masih ada beberapa apa namanya keluhan-keluhan. Yang pertama itu adalah karena mesin perahu nelayan yang ada di sana itu sekarang sudah kebanyakan berbahan bakar solar Pak, jadi oleh karena itu kami mohon supaya ini nelayan-nelayan yang memiliki mesin yang berbahan bakar solar itu bisa diakomodir Pak, satu.

Kemudian BPBL saya kira kemarin kita sudah melaksanakan peresmian dan penyalan pertama sama Bu Ida, terima kasih Pak dan masyarakat merasa senang juga, termasuk juga yang di Cikawung Pak penarikan jaringan baru listrik sudah cukup, sudah terrealisasi tetapi masih ada beberapa usulan yang memang sampai hari ini apa namanya belum terealisasi oleh karena ketidaksinkronan data Pak, ini Bu Ida. Masih ada data yang tidak sinkron karena sesuai dengan, kalau kita kan mengusulkan sesuai dengan data di lapangan, tetapi begitu diverifikasi ternyata masih ada yang tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh PLN.

Oleh karena itu saya kira ini perlu penegasan Pak Menteri terkait dengan data yang menjadi acuan usulan kita begitu, apakah data lapangan atau data sesuai DTKS, atau data yang dimiliki oleh PLN.

Selanjutnya untuk PJUTS, saya kira ini menjadi persoalan kita bersama karena sebenarnya PJUTS itu masih sangat kita butuhkan Pak Menteri, tetapi saya dengar untuk tahun 2024 ini PJUTS ya belum, belum bisa dianggarkan begitu ya Pak. Oleh karena itu, kami mohon supaya ya tahun depan ya program PJUTS masih bisa dapat direalisasikan begitu.

Saya kira demikian, terima kasih. Oh ada BP Migas juga, terima kasih Bu sudah hadir.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Bambang.

Lanjut Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua *kan* kita *nggak* banyak, Pak Ridwan Hisyam dulu jadi *nggak* apa-apa.

Silakan, habis itu baru saya *nggak* apa-apa.



F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Senior dulu lah Pak Ramson kan lagi siap-siap satu putaran ini.

Silakan Pak Ramson.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak, salah satu aja *monggo* saya persilakan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya menghormati aja karena beliau selalu di grup saya bukan caleg, jadi juga bukan partai koalisi nanti koalisi yang lain pada *jealous kan nggak enak* juga, kita kan tetap jaga persaudaraan Komisi VII.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

Pak Ketua dan teman-teman Anggota yang terhormat,
Pak Menteri dan jajarannya semua yang saya hormati.

Ini kebetulan singkat aja bahannya Pak Menteri, pertama yang saya tanya soal progres mitra instansi pengelola atau MIP Batubara. Ini kira-kira nanti realisasinya kapan mulai, yang kedua persiapannya sudah matang benar *nggak gitu*. Artinya terus yang ketiga, kalau ini direalisasikan berarti PLN harus membayar dulu sesuai dengan harga pasar global ya Pak ya? Ini nanti tolong dijawab tapi tidak tertulis kalau ini, kalau apa interaktif nanti teman-teman yang lain masih ingin menanyakan.

Jadi tiga poin itu karena kalau PLN harus bayar dulu nanti juga harus dilihat posisi *cash flow* mereka, jadi karena PLN juga masih *over supply*, juga sedang saya lihat beberapa *extra cost*-nya untuk men-*delete* pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan energi energi primer fosil karena proses transisi energi ke energi terbarukan. Jadi yang punya potensi-potensi dan juga yang masih MoU dan atau yang belum dibangun tapi sudah matang perjanjiannya, mereka kalau men-*delete* itu *kan* butuh juga *cost*, tidak mungkin gratis begitu aja.

Jadi saya nanti tolong dijelaskan mulai kapan kira-kira itu tadi realisasinya dan pas realisasinya kira-kira PLN langsung membayar penuh *nggak* sesuai dengan harga mekanisme pasar global kepada vendor atau supplier batubara untuk PLN karena kita juga harus menjaga *cash flow* PLN, jangan sampai terganggu keamanan suplai energi listrik untuk masyarakat.



Terus yang berikutnya untuk program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, seperti converter BBM ke BBG untuk para petani. Memang ini kalau mau dibuat apa namanya anggarannya lagi, juga perlu ada anggaran untuk proses penyerahannya Pak Menteri jadi jangan tanggung-tanggung karena begini saya terus terang aja Pak Menteri. Di dapil saya di salah satu kabupaten dapat 1.000, saya *cost* saya 70 juta Pak, untuk 1.000 *cost* yang saya keluarkan dari dana pribadi saya lebih lah 70 juta rupiah karena saya harus bayar semua yang 10 orang yang memproses itu 9 hari, itu saya bayar baik dari instansi maupun yang dari tim saya karena harus aman dan harus saya jamin tidak ada pungutan dari para petani, satu rupiah pun.

Jadi yang mendata pun saya kasih ongkosnya Pak Menteri, yang mendata saya kasih, yang membawa petani ke tempat penyerahan juga saya kasih honorinya per hari. Jadi total ada kalkulasinya itu dari tim saya 72 juta rupiah, itu saya datang juga tiga kali mengecek. Pertama pembukaan, hadir bersama direktur yang baik itu Pak Laode baik juga beliau. Terus sesudah itu saya dua kali datang selalu ini melihat ke lapangan karena saya tidak pernah mau hanya laporan-laporan dari tim saya, saya cek ke lapangan semua data dan saya tanya karena saya buat juga pernyataan, selain syarat-syarat administratif yang sudah ditetapkan sesuai dengan dari Kementerian ESDM ada tambahan khusus dari saya.

Pernyataan dari penerima pompa bahwa dia, bahwa dia tidak memberikan uang pungutan satu rupiah pun. Ada diinterogasi oleh tim saya di Kabupaten Batang, dia sudah ada memberikan satu orang disuruh pulang, minta dikembalikan uangnya kamu ada pernyataan sudah kamu terima uang baru dikasih, dia *nggak* datang lagi, tidak diberikan karena itu perintah dari saya langsung. Jadi tidak boleh ada itu karena semua saya bayar yang di sana, kebetulan hanya dapat 350 sekitar 24 juta saya habis biayanya karena saya ingin *clean*, bersih, saya bukan hanya omong *gitu* jadi tim saya juga harus bersih. Saya bilang bagus uang saya keluar, saya ngomong begitu.

Jadi karena memang tahun kemarin saya cek, *kok* ada sedikit-sedikit gejolak-gejolak, tahu-tahu *nggak* ada anggaran dari mana pun, dari pemda tidak ada, dari mana-mana *nggak* ada tahun kemarin. Jadi makannya mereka ini makannya semua saya bilang saya servis yang bagus makan semua tim, termasuk dari instansi, dari manapun makanannya yang enak ya. Kalau pas saya datang *on the spot* petaninya juga ikut makan siang juga, *gitu* Pak saya *clean* supaya mereka *clean* juga.

Saya bilang ini *clean* ini saya bilang karena Pak Prabowo mengatakan harus menyelamatkan kekayaan negara, harus menyelamatkan kekayaan negara untuk menambah anggaran untuk rakyat, untuk rakyat, jadi bisa makan siang gratis bagi anak sekolah dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi saya langsung itu di dapil saya langsung tahu semua, iya jadi ya namanya perjuangan *kan* butuh pengorbanan Pak Menteri.

Jadi itu Pak Menteri, jadi itu makanya Pak Profesor melalui Pak Menteri kita tidak hanya teoritis Pak, kita harus tahu aplikasi termasuk soal LPG 3 kilogram itu banyak juga yang tidak *match* di lapangan. Jadi jangan asal



membuat peraturan Pak, saya langsung *on the spot* ke lapangan saya lihat situasi. Jadi kalau membuat kebijakan itu lain kali *insya Allah* saya dipercayai di situ saya akan selalu kirim tim khusus-tim khusus yang muda-muda ke lapangan.

Tim khusus-tim khusus buat, sebelum dibuat kebijakan yang bisa imperatif karena kalau tidak repot juga jadi akhirnya menyulitkan rakyat juga atau yang sedikit saya atau tim-tim akhirnya dia serba dilema, kalau tidak ada ini dia tidak ada uang juga untuk ongkosnya untuk makannya untuk penyerahan-penyerahan itu, uangnya dari mana, mereka juga apa namanya ya relawan-relawan juga *kan*. Sedangkan yang dari pemda aja harus dikasih makan di situ yang mengecek, konsultan juga dikasih makan di situ. Itu *kan* beberapa komponen yang ada di situ.

Itu Pak Menteri, yang dari saya itu soal program itu kalau soal waktu converter BBM ke BBG nelayan dulu sih tidak ada masalah karena dikit-dikit, di lokasi-lokasi tertentu sedikit-sedikit, kalau itu *kan* langsung banyak. Memang itu sangat membantu petani khususnya di musim kemarau, kalau sekarang memang akhirnya apa namanya sedikit LPG 3 kilogram *over supply* karena udah musim hujan nih karena saya cek juga. Loh kenapa ini saya cek di sistemnya di sana bahwa Pertamina satu hari diliburkan katanya untuk suplai LPG 3 kilogram ke semua agen, saya cek kenapa, saya cek di lapangan oh sebabnya petani yang sudah ribuan orang punya pompa tidak membeli LPG karena sekarang lagi musim hujan, itu mempengaruhi juga. Jadi bukan karena disalahgunakan musim kemarau itu banyak permintaannya, satu petani satu tabung LPG.

Hal-hal seperti itu Pak Profesor perlu dicek di lapangan, saya cek ke lapangan. Kebetulan saya lagi banyak di dapil ini karena sesekali saya hadir untuk *exercise* intelektual itu karena saya bolak-balik dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, yang saya ketemuin ya tahulah ya *kan*.

Jadi itu Pak Profesor melalui Pak Menteri kita harus tahu lapangan, harus tahu lapangan. Jadi yang lain-lain tadi program itu seharusnya itu dilanjutkan, *nggak* tahu saya apa itu 2024 masih ada *nggak*.

Terus PJUTS itu bagaimana, itu bagus cuman itu terima kasih dari timya PJUTS ada yang lampunya yang rusak-rusak, sudah diperbaiki. Tadi barusan di WA tim saya juga bilang sudah diperbaiki Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang udah nyala yang tadinya baterainya apa namanya sudah pada rusak padahal baru dipasang. Itu saya apresiasi responsnya karena itu *kan* untuk rakyat, kita ini *kan* kalau berbuat untuk rakyat Pak Menteri semua eselonnya kita harus ikhlas kalau untuk rakyat. Jadi rakyat itu betul-betul menikmati, kita didoakan, *alhamdulillah* aja itu sudah doa, apalagi panjang lagi *kan* lebih panjang lagi doanya, iya barokahnya lebih tinggi, aamin.

Jadi itu aja dulu itu aja jadi Pak Profesor itu tadi soal kebijakan apa itu perlu di ricek di lapangan supaya lebih moderat, itu jadi semua ada tahapan-tahapannya.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ramson.

Baik terima kasih, berikut dari Fraksi Partai Nasdem kami persilakan. Silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik Pimpinan, terima kasih juga kepada rekan-rekan semua.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom.*

Terima kasih untuk paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri yang menurut kami sudah sangat bagus dan cukup detail, sehingga kami juga sudah memahaminya dengan baik.

Terkait dengan progres pembentukan Mitra Instansi Pengelolaan Batubara karena ini masih berproges, jadi mungkin saya tidak mengomentari di situ. Saya langsung ke program-program yang sudah sampai ke di dapil, khususnya dapil kami terima kasih banyak karena BPBL berjalan dengan lancar dan PJUTS tentunya sementara berprogres.

Yang menjadi harapan dari kami hanya satu karena tahun depan itu tidak ada PJUTS, namun kayaknya memang *nggak* ada ya tapi kami sangat berharap ini ada karena sangat berguna, bermanfaat sekali buat masyarakat khususnya daerah-daerah yang listriknya masih nyala jam 6 sore mati jam 6 pagi, bahkan di tengah-tengahnya itu sering mati.

Khusus untuk daerah pariwisata Raja Ampat para pelaku bisnis seperti *homestay* dan lain sebagainya mereka sangat-sangat berharap bahwa PJUTS itu ada, juga anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah daerah kepulauan yang mereka juga ada yang masih pakai pelita, kita ingin sekali membagi ke pulau-pulau tersebut sehingga kalau malam ada cahaya dari PJUTS itu mereka bisa belajar ramai-ramai di bawah lampu itu begitu. Juga demikian di daerah pegunungan maupun di dataran yang masih perkampungan-perkampungan yang belum teraliri listrik begitu.

Jadi harapan besar kami tetap kita berjuang bersama antara ESDM dan teman-teman di Komisi VII agar PJUTS ini yang merupakan wacana dari Pak Presiden untuk Indonesia terang, yang tentunya oleh kami tim Amin ini merasa ini wajib dilanjutkan begitu karena ini program bagus. Ini program bagus, program yang sangat bermanfaat buat masyarakat khususnya daerah 3T seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh rekan kami Pak Bung Ramson bahwa Prabowo juga menginginkan hal yang sama.

Nah kami pun ingin supaya semua di Indonesia ini menikmati keadilan khususnya energi tadi.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Ini rupanya banyak titipan dari timses-timses nih Pak Menteri.

Baik, berikutnya dari Fraksi Partai PKB silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Bapak Ketua, Pimpinan dan seluruh sahabat Komisi VII, Yang kami banggakan Pak Menteri ESDM beserta segenap jajarannya, juga Ibu Kepala BPH Migas beserta komite yang hadir dan juga ada Bapak Kepala BPMA beserta jajarannya.

Terima kasih Pak Menteri, atas tadi paparan yang sudah disampaikan begitu ya, ini juga sebuah langkah yang cepat begitu, terkait apa yang menjadi kebutuhan dari sektor batubara saat ini.

Tapi yang perlu kami *stressing* di sini Pak, mungkin dalam pelaksanaan skema pungut dana salur batubara ini *kan* kita berupaya supaya aspek kesetaraan atau level *playing field* itu bisa dilaksanakan secara transparan dan terbuka begitu untuk seluruh penambang batubara. *Nah* terkait revisi formula harga batubara acuan, saya pikir ini perlu ditetapkan sebelum implementasi pungut salur batubara ini diterapkan.



Jadi perlu ada proses sosialisasi dan itu juga atas kesepakatan dari seluruh elemen yang termasuk di dalamnya *gitu*, entah dari sektor usaha atau sektor masyarakat di sekitar *field* dan lain sebagainya. Sehingga revisi formula harga tersebut agak mendesak begitu ya untuk bisa dilakukan supaya formulanya nanti bisa merefleksikan atau mendekati harga jual yang aktual *gitu*. Sehingga sudah *nggak* ada Pak yang bermain-main di situ *gitu* maksudnya.

Yang berikutnya terkait dengan rencana untuk membentuk Badan Layanan Umum Batubara menjadi skema Mitra Instansi Pemerintah. *Nah* ini mungkin perlu dijelaskan lagi Pak Menteri, bahwa MIP ini berarti siapa yang membawahi *gitu*, dia harus bertanggung jawab ke mana? Karena kalau yang dijelaskan bahwa ini ditugaskan kepada salah satu BUMN yang dalam pemahaman saya berarti *technically* dia bertanggung jawab ke Kementerian BUMN. Lalu Kementerian ESDM ini terlibatnya di sebelah mana *gitu*, Pak Menteri ini emang sangat baik hati *gitu*. Jadi pasukannya itu kayak, kayak diserahkan ke kementerian-kementerian yang lain *gitu*.

Nah selain itu calon MIP ini *kan* tadi dijelaskan sepakat untuk menggunakan *dashboard system* yang di-*develope* oleh bank-bank himbara ya, jadi Mandiri, BRI, BNI begitu. Saya pikir penting untuk ini *kan* tadi bank-bank himbara ini tadi sudah sepakat untuk tidak mencantumkan *leading bank*-nya, sehingga saya pikir pihak pemerintah itu harus benar-benar memastikan *security* dari aplikasi yang akan digunakan ke depan Pak karena kita tahu yang kemarin aplikasi Covid aja bobol, lalu aplikasi-aplikasi yang lain milik pemerintah juga bisa di-*hacker* *gitu*. Sehingga kami berharap bahwa ini nantinya harus benar-benar bisa dipastikan keamanannya, mengingat dana yang akan dipungut ini nilainya sangat besar ya bahkan bisa di atas 100 triliun per tahun *gitu*. Sehingga mekanisme manajemen untuk pemungutan, penyetoran, dan penyalurannya juga harus bisa dipastikan lebih baik.

Berikutnya Pak terkait realisasi program yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun, belum ya, hampir, hampir akhir tahun. Kami mewakili konstituen di daerah pemilihan Jawa Timur 9 Pak Menteri, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai program yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM. Dalam hal ini kami di Dapil Jawa Timur 9 Pak, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro kami laporkan konkit petani ada 953 unit, konkit nelayan ada 266 unit, BPBL ada 2.848 rumah tangga yang akhirnya mendapatkan jaringan listrik sendiri. Waduh Pak Dirjen langsung senyum-senyum, terima kasih Pak Dirjen.

Kalau tahun ini 125.000 berarti tahun depan bisa 150.000 Pak, oh malah 250.000, *oh* tak pikir yang sebagian mau dikasihkan untuk PJUTS Pak, *nggak* ya. Untuk PJUTS ada 500 unit saat ini sedang tahapan *survey* begitu, Pak Yudho terima kasih. Cuman yang menjadi keresahan kami hari ini itu memang Pak Menteri bahwa PJUTS itu anggarannya masih nol.

Nah kalau melihat capaian program Pak, kita lihat di halaman 9 ada konversi motor listrik disediakan 350 aja yang riil terkonversi hanya 60 unit Pak,

yang terproses hanya 78 unit ini *kan* berarti 50% aja belum nyampai sampai dengan akhir tahun. Saya pikir ini bisa dipastikan targetnya Bapak kayaknya *nggak* tercapai deh Pak, jadi kayaknya program seperti ini tahun depan kasih ke PJUTS saja *gitu*.

Terus yang lain, ya saya pikir masih banyak lah Pak program-program yang istilahnya masih bisa ditunda dibanding dengan kebutuhan masyarakat atas energi bersih yang bisa diraih dengan adanya pemasangan PJUTS *gitu* dalam rangka mencapai bauran energi baru dan terbarukan. Katanya mau diturunkan Pak targetnya dari 23%, ini *kan* kabar buruk untuk kita yang sedang memperjuangkan realisasinya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Sehingga kami memohon kebijaksanaan Pak Menteri untuk bisa merekonstruksi ulang anggaran-anggaran untuk tahun 2024, sehingga program-program yang langsung dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat, bangsa dan negara itu bisa didahulukan dan direalisasikan.

Aamin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang lain *nggak* ada yang amin soalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, oh ini ada Pak Sekjen DEN dan Kepala BPSDM, oh sama dengan Pak Menteri.

Terima kasih, kami akhiri.

*Wallahulmuafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ratna Juwita.

Berikut dari Fraksi Partai Demokrat, tidak ada ya, aduh mohon maaf tidak terlihat.

Silakan Pak Hendrik, mohon maaf sebelumnya.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Baik, terima kasih Pak Ketua.

Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Komisi VII, serta Rekan-rekan Komisi VII yang saya sayangi,
Pak Menteri beserta jaajaran, para Dirjen dan juga di sini Ibu Kepala BPH, Komite BPH dan Kepala BPMA yang saya hormati.

Terima kasih atas paparannya yang sudah sampaikan kepada kami.



Pertanyaan pertama terkait dengan progres pembentukan mitra instansi, saya ingin penjelasan Pak terkait perbankan himbara ini BRI, BNI, Mandiri, apa latar belakangnya tiga bank ini Pak? Kenapa swasta tidak dilibatkan terhadap program ini. Ini juga mohon penjelasan, jangan nanti ada di tengah jalan di, ada di apa namanya dituntut dengan yang pihak lain *gitu* Pak. Ini *kan* perlu penjelasan bagi kita, kenapa 3 bank ini yang diajukan.

Berikutnya saya membaca materi ini Pak, realisasi penganggaran tahun 2023 masih ada terlihat di bawah 50%. Kalau kita hitung November sekarang semestinya rata-rata 70% lah *gitu* ya program ini realisasinya, tapi masih ada di bawah 70%. Tolong penjelasannya kenapa ini terjadi Pak di bawah 70% agar kita tahu masalah-masalahnya apa, supaya kita bisa memetakan masalah-masalah yang terhadap program-program ini.

Berikutnya terkait paket kegiatan strategis, di sini ada tender dan non-tender. Kami mohon penjelasan Pak yang non-tender ini Pak, ini kegiatan apa ini ya, kebijakan apa, kenapa dilakukan non-tender ya soalnya banyak juga ini Pak lumayan ini ada 405 paket, pasti ada mitranya. Terus kenapa sama mitra ini pasti ada penjelasan-penjasannya.

Berikutnya terkait program progres pelaksanaan kegiatan tahun 2003 pipa gas, konkit dan segala macamnya ini Pak. Semestinya pemahaman saya Pak Menteri seharusnya menjelaskan, memberikan data juga daerah mana ini semua Pak ya. Misalnya pipa gas di mana ya, konkit di mana saja, jadi *kan* di Sabang-Merauke harus jelas provinsi-provinsinya. Sumatera Utara berapa *gitu* karena banyak program ini Pak, karena saya terus terang aja agak cemburu Pak ada sebagian provinsi, di provinsi saya tidak ada *gitu* loh, *nggak* minta, padahal Pak Menteri itu alumni dari Medan loh Pak Menteri. Jadi mohon penjelasannya Pak. Ini *panetrasi*-nya program ini berapa, dari sekian banyak program ini tolong jelaskan provinsi-provinsi mana yang mendapatkan program ini *gitu* supaya jelas Pak, kalau di sini kita *nggak* tahu nih ini program di mana aja ya *gitu* loh, kira-kira *gitu*.

Nah kali ini saya hanya bisa memberikan terima kasih kepada Pak Menteri terkait program BPBL aja Pak, yang lain saya belum bisa kasih terima kasih Pak. Iya contohnya konkit nelayan karena belum realisasi, saya tidak akan terima kasih Pak ya, petani juga belum, belum program ini belum. Jadi saya hanya bisa, masyarakat saya hanya bisa menyampaikan terima kasih terhadap program BPBL aja dan tanggal 25 rencana kita akan ada acara untuk program BPBL ini Pak, mudah-mudahan dari Dirjen Kelistrikan bisa hadir. Itu aja yang mungkin saya mohon penjelasannya kiranya bisa apa yang diharapkan penjelasan itu bisa kami dapatkan.

Berikutnya Pak yang terakhir, saya atas nama panitia Natal ya MPR, DPR, DPD dan sekaligus Ketua Panitia Natal Pak, yang kami akan selenggarakan tanggal 5 Desember 2023 ini. Kita mohon kehadiran dari Kementerian ESDM dan jajarannya dan juga dukungannya.

Terima kasih.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Hendrik.

Lanjut dari Fraksi PKS, kami persilakan Pak Mul.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Bapak Menteri dan jajarannya, Sekretaris DEN, Kepala BPH Migas, SKK Migas, BPMA.

Yang pertama, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Menteri dan jajarannya dari masyarakat kami di Tangerang Raya Pak, karena bantuannya baik. PJUTS maupun program pasang baru listrik sudah sangat membahagiakan mereka Pak, mereka sangat senang, gembira, tempat-tempat yang tadinya gelap, rawan sekarang menjadi terang-benderang mereka bermain di bawah lampu meskipun mati listrik. *Nah* ini luar biasa mereka sangat bergembira karenanya saya mendukung kalau memang nanti di tahun 2024 ada usulan APBN perubahan dimasukkan anggaran untuk PJUTS ini.

Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah semestinya tidak terburu-buru untuk memberikan perpanjangan izin kepada PT Freeport, kan ini izinnya 2 kali 10 berarti 2041 habis, 2031 perpanjangan awal. Perundangan *kan* menyatakan bahwa paling cepat perizinan dilakukan atau pendaftarannya 5 tahun sebelum berakhir, paling lambat 1 tahun. Itu *kan* berarti jatuhnya tahun 2026, jadi semestinya di evaluasi dulu dengan seksama PT Freeport ini jangan mudah diberikan izin karena menurut saya kinerja terkait pembangunan *smelter* itu kurang bagus, kurang perform, sampai terakhir bulan Juli, Juni ya habis jatuh undang-undang yang menyatakan setelah itu harusnya tidak boleh lagi ekspor konsentrat. Akhirnya pemerintah mengalah, melanggar konstitusi, memberikan izin untuk ekspor konsentrat, fakta.

Nah lalu kalau sekarang tiba-tiba di awal waktu masih jauh, Belanda masih jauh sudah diberikan izin lagi, ini kan keterlaluhan kalau menurut saya. 2026 biarlah, 2026 saja nanti diberikan izinnya pada pemerintahan baru, amiiin, jangan pemerintahan sekarang yang dekat Pemilu. Ini *kan* kesannya ada *deal-deal* politik jangan-jangan nih, uang muka nih, biar lah sesuai perundangan dijalankan secara konsisten, kita evaluasi dulu ya kan dan kita berharap juga agar pengendali teknis Freeport itu diberikan ke pihak Indonesia seperti juga Vale *kan*, kita desak agar konsolidasi keuangan dan teknisnya dikendalikan oleh pihak Indonesia, semestinya Freeport pun demikian.

Saya rasa itu Pak Menteri dan teman-teman sekalian, selamat Pak Menteri evaluasinya menurut kami bagus, tinggal menunggu AML saja ini.



Demikian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mul.

Berikut Fraksi PAN tetapi saya puter aja, maaf Pak Nasril nanti setelah ini kita putar yang untuk kedua ya, bukan putaran kedua tetapi kita memutar untuk pertanyaan kedua.

Silakan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,
Pak Menteri dan semua jajaran dan teman-teman Komisi VII yang kami banggakan.

Pertama terhadap progres Mitra Instansi Pengelola Batubara, kami tentunya ya pembahasan ini *kan* sudah cukup lama ya namun catatan yang Pak Menteri sampaikan kepada rapat pada hari ini ya cukup namun masih perlu penjelasan ya. Bagaimanapun kita masih mau mendengarkan terhadap Permen, Kepmen ESDM-nya terhadap Juknis alur kerja dan tanggung jawab antara IP dan MIP.

Nah ini yang sesungguhnya masih perlu, apakah perlu kami tidak, tidak ikut campur dalam persoalan teknis dan sebagainya, paling tidak terhadap sosialisasi awal ya. Sosialisasi awal terhadap Permen dan Kepmen ini, sehingga jangan nanti orang luar lebih tahu mendahului daripada Anggota Komisi VII karena ini *kan* merupakan diskusi kita bersama. Sehingga perlu kiranya catatan kita Ketua ya Pimpinan ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu di secara internal di Komisi VII, jangan sampai nanti para pengusaha itu bertanya-tanya kepada kita sementara kita belum tahu sama sekali terhadap persoalan Juknisnya itu. Dengan catatan itulah tentunya kita dapat ikut mensosialisasikan lebih lanjut terhadap program yang baik ini.

Yang kedua kami meminta kepada persetujuan Komisi VII terhadap apa yang telah dilansir oleh teman-teman terdahulu untuk dua program yang sesungguhnya menjadi idola daripada masyarakat. Pertama program PJUTS, kita tahu di APBN 2024 di Kementerian ESDM ini hanya sangat kecil sekali bahkan tidak ada karena dialihkan kepada subsidi motor, motor listrik, *nah* atau



ke mana, tapi yang jelas di 2024 ini tidak ada PJUTS di Kementerian ESDM. Perlu kami minta penjelasan dan kami berharap karena sudah banyak yang merespon ini secara positif ya di rapat kali ini, ini dapat dilanjutkan.

Catatan kami perlu perubahan ya revisi, revisi anggaran, revisi anggaran ya untuk program PJUTS karena bagaimanapun ketika hari ini kita turun di tengah-tengah masyarakat, saya pastikan kami masih terhutang, masih terhutang janji paling tidak di tengah-tengah masyarakat desa. Masih terutang janji di tengah-tengah masyarakat desa sehingga kita bayangkan aja, contoh sederhana Pak Menteri lebih banyak rumah ibadah yang gelap daripada kehadiran PJUTS, baik apakah masjid, gereja dan sebagainya. Saya jujur saja penempatan itu semua di rumah ibadah, jadi lebih banyak rumah ibadah yang belum dapat penerangan PJUTS daripada kehadiran PJUTS, itu catatan kami.

Maka kami berharap pada rapat ini dimasukkan dalam sebuah kesimpulan untuk PJUTS termasuk BPBL. BPBL ini sangat luar biasa antusias masyarakat, ternyata memang hari ini satu meteran itu bergandeng 3 rumah tangga, bergandeng 4 ya kita takut terjadi hal-hal yang *nggak* kita inginkan terhadap konsleting listrik dan sebagainya, dan hari ini juga masih ada ribuan permohonan yang di tangan kita. Kita tetap janjikan selagi saya masih di Komisi VII *insya* Allah ini akan jalan ya tergantung tahapan-tahapannya saja.

Nah ini saya berharap kepada Komisi VII untuk mencatat dua catatan ini menjadi sebuah kesimpulan pada rapat kali ini.

Yang selanjutnya Pak Menteri yang terakhir, tentunya apresiasi kami kepada Pimpinan Komisi VII, Anggota Komisi VII dan Kementerian ESDM bahwa program yang kita laksanakan terhadap evaluasi anggaran 2023 ini sangat-sangat bermanfaat.

Terakhir pengaduan masyarakat (Dumas) Pak Menteri, yaitu salah satu PT Josua Mahakam Mineral yang mempunyai RKAB-nya hampir 1,5 juta ton tapi ininya lokasi tambang ya dengan JT ini tidak memungkinkan ini ada aliran ataupun tidak memungkinkan penggalian di PT tersebut, di tambang tersebut. Namun ini terjadi terus ya, seakan-akan ada terindikasi dokumen terbang di sini, *nah* ini kami perlu ya kepada Pimpinan Panja Ilegal Mining untuk mengecek dan melakukan *fact finding* ke lokasi. Namun kalau kita lihat di peta ya, di peta ini tidak mungkin sampai kita ke lokasi karena tidak ada *hauling* nya, tidak ada *hauling*, bahkan kita harus naik perairan yang sejauh berapa kilometer jauh yang sesungguhnya airnya dangkal.

Nah ini *kan* seakan-akan penerbitan IUP dan sekaligus RKAB-nya ini ya semacam akal-akalan kami melihat. Kami minta kepada Pak Dirjen ya yang sebentar lagi akan diterbitkan ataupun ya Satgas Ilegal Mining ini yang prioritas terutama dicek Pak karena sangat luar biasa dokumen terbangnya yang hari ini oknum yang bekerja.

Ini catatan kami terhadap temuan dan banyak Dumas yang di tangan saya ini, ini salah satunya Pak yaitu PT Josua Mahakam Mineral.



Saya pikir itu catatan kami, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Kita buka sesi kedua jadi untuk Fraksi PDIP, silakan Pak Willy.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati,
Pak Menteri ESDM dan seluruh jajaran.

Pertama saya juga tentu memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan jajarannya dalam konkret beberapa progres 2023 yang sudah dilaksanakan. Kemarin kebetulan saya juga ikut hadir dalam menyerahkan konkrit nelayan berupa mesin ya, mesin motor yang konversi dari minyak, bahan bakar minyak ke gas. Titipan mereka itu Pak Menteri ya kalau bisa jangan mesinnya, tapi juga dengan perahunya.

Ini memang sering saya dengar ya, sering saya dengar teman-teman juga pasti punya, punya keinginan yang sama. Kita juga langsung menerima ancaman Pak Menteri kalau cuman mesin ya karena mesin ini bisa dijadikan jadi mesin untuk air ya tapi tidak untuk nelayan ya akibatnya ya karena tidak ada, tidak ada perahunya. *Nah* sehingga menurut saya ini bisa *nggak* tepat sasaran ya maka oleh karena itu saya pikir lebih baik lengkapi sekalian *gitu* ya daripada tanggung-tanggung ya karena ada banyak kemungkinan, boleh nanti dicek ya mesin yang tidak ada perahunya umumnya beralih fungsi ya tidak jadi perahu nelayan tetapi untuk mengangkat air, kemudian untuk listrik dan sebagainya mereka gunakan. *Nah* maka untuk itu saya pikir lebih baik kita ya kalau ngasih ya ngasih yang komplit *gitu* supaya mereka betul-betul mampu dan saya melihat ini aspirasi yang kemarin pagi saya dapatkan.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri sehubungan dengan daerah pemilihan saya juga, ya dan ini kebetulan juga ada Pak Dirjen Listrik ya. Saya ingin tanyakan ya karena sampai saat ini masih Provinsi Kalimantan Tengah lah yang paling kurang berlistrik desanya atau kurang nyala. Dari 1.571 desa ya beberapa waktu yang lalu 450 desa tuh belum masuk PLN atau negara belum hadir Pak di sana ya.

Nah maka untuk itu pernah kita bersama-sama melakukan rapat koordinasi mengundang gubernur, bupati, walikota dan juga Pimpinan-pimpinan DPR ya, alasannya saat itu adalah bahwa infrastruktur di Kalteng itu belum mendukung. Sehingga pemasangan listrik masuk ke pedesaan itu



kesulitan karena tidak ada jalan dan jembatan, *nah* itu kita akui. Rupanya Pak Menteri, Pak Gubernur dan juga para bupati walikota dan DPR itu komit mereka sudah buat itu jalan di jembatan. *Nah* lalu 2023 ini ada 132 desa kelurahan yang dilistrikan dengan anggaran kurang lebih 500 miliar, ini sedang jalan.

Nah lalu saya mendapat berita dan kabar, mudah-mudahan berita kabar ini ya *hoax* ya atau mungkin tidak benar *gitu* karena dari perhitungan kami untuk percepatan listrik ini di Kalteng itu sudah di *ploting* 2024, 165 desa dan kelurahan ya ini diajukan ya oleh teman-teman di PLN. Mendapat kabar berita bahwa tidak ada anggaran, artinya dana pernyataan modal negara itu tidak ada ya. Jadi ini apakah memang tidak ada ya, kalau tidak ada ya ada-adakan lah *gitu* khususnya untuk Kalimantan Tengah, yang lain nanti dulu ya atau sama-sama juga dengan yang. Itu pesan Pak Ganjar Pranowo Pak ya, listrik di Indonesia ini harus nyala semua *gitu* ya.

Maka untuk itu riil-nya saya ingin nanti penegasan, apakah benar bahwa pernyataan modal negara untuk tahun 2024 untuk 165 desa yang sudah di *planning* untuk dipasang 2024 itu betul-betul tidak ada. Maka makanya saya usulkan supaya lewat Pak Menteri untuk berjuang karena itu anggarannya *nggak* besar Pak Menteri, kalau 165 itu. Kalau sudah 165 terpasang artinya 2025 ke atas ya, 2025 ke atas itu kurang lebih 153 desa dan kelurahan di Kalteng itu daftar tunggu untuk periode berikutnya, mungkin untuk Anggota Dewan berikutnya ya mungkin seperti itu ya.

Nah maka untuk itu saya berharap anggaran 1,2 triliun itu bisa dikucurkan untuk Kalteng Pak, untuk percepatan. *Toh* kalau Kalteng merupakan salah satu provinsi yang tertinggal ya listrik desanya otomatis Indonesia Pak. Artinya Indonesia, artinya kita masih belum mampu mensejahterakan rakyat di Indonesia. Sementara Kalteng itu *over supply* Pak ya 45% tenaga daya listrik itu tidak terpakai karena masalah jaringan karena luasnya daerah ini. *Nah* ini harapan saya menjadi perhatian Pak Menteri mendorong agar Pak Dirjen ini kencang sedikit ke Kementerian Keuangan dengan cara apapun ya, supaya apa yang menjadi harapan kita Indonesia terang itu terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.

Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan, memang apa yang disampaikan teman-teman tentang PJUTS itu penting Pak dan semua sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi saya melihat ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian negara, pemerintah dalam hal ini karena gini Pak, kita tahu bahwa setiap pembayaran rekening listrik itu *kan* dipotong Pak, dipotong untuk penerangan jalan umum Pak ya. Tetapi keluhan masyarakat kelihatannya dana itu tidak dipakai untuk kembali untuk menerangkan jalan *gitu* atau menambah lagi sambungan atau tiang ke daerah-daerah yang belum ada penerangannya.

Menurut saya begini, saya lewat menteri mungkin mengusulkan agar merubah aturan main yang saat ini itu *kan* diserahkan kepada kota atau kabupaten melalui Dinas Perhubungan atau apa ya yang ada di sana. Saya pikir itu serahkan ke PLN saja Pak, tarik semua itu, kewenangan itu, jadi PLN yang urus karena masyarakat tuh *nggak* tahu urusan ini. Apalagi kalau dana



yang dibayar oleh masyarakat itu kebanyakan tidak kembali lagi untuk penerangan *gitu*.

Nah kemudian kalau kerusakan lambat banget Pak, jadi yang dikejar juga PLN bukan kota atau kabupaten, Pak. *Nah* jadi melalui Pak Menteri karena kita berbicara tentang energi tentang listrik, saya pikir ini sudah ranahnya ke Pak Menteri. Mungkin ini salah satu apa namanya pekerjaan baru yang menjadi *legacy* dari Pak Menteri di rezim yang ini Pak ya. Jadi ada perubahan yang lebih bagus untuk penerangan jalan ya, kalau nantinya PJUTS-nya yang memang tidak banyak bisa diberikan kepada masyarakat.

Lalu yang yang terakhir ya tadi sudah di *celetuk* teman-teman tentang AKT ya Pak Willy. Jadi AKT ini Pak masih mengganggu saya Pak, di kampung saya sana, yang saya ingin tanyakan ke Pak Menteri karena saya ini sudah pernah bertemu juga Pak Menteri. Kapan ini dilaksanakan lagi lelang ulang *gitu* ya lelang ulang, *nah* kalau hal ini mungkin supaya lebih mudah saya menjelaskan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah daerah yang ada di sana. Saya minta ini Pak Ketua jawabannya tertulis ya untuk menjelaskan kenapa sampai saat ini AKT itu belum dilelang ya karena pernah dilelang gagal, karena yang ditunjuk oleh negara pada saat itu badan usaha milik daerah itu tidak mampu membayar kewajiban, sehingga ini batal.

Nah saat ini kita ingin ini segera dilakukan mengingat ini salah satu *illegal mining* yang terbesar yang banyak merugikan negara dan juga tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan daerah. Saya minta ini menjadi perhatian Pak Menteri ya agar ini segera diberikan tanggapan dan jawaban tertulis ya agar kita di Komisi VII untuk fungsi pengawasan ya kita tidak disalahkan, nanti ditanya apa sih kerjaan kalian di Komisi VII kok *nggak* ngawasin hal yang seperti ini. Termasuk saya dan 2 rekan kami, kami bertiga Pak dari Kalteng ini yang terus mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentang AKT Pak.

Nah yang terakhir, tadi terakhir ini yang terakhir sekali ya. Saya ada usul Pak tentang *illegal* yang dilakukan oleh rakyat ya, *illegal mining* yang dilakukan oleh rakyat. Menurut hemat kami ya dan juga masukan-masukan yang ada harusnya negara yang ikut bertanggung jawab Pak, artinya memberikan wilayah pertambangan khusus ya kepada penambang-penambang rakyat itu di daerah yang sudah disurvei geologi ada mineralnya.

Jadi negara harus berani keluar anggaran ya, kemudian menentukan ruang-ruang di mana mereka mengerjakan ini agar mereka tidak menjadi-jadi merusak lingkungan dan juga *lost*-nya pendapatan negara, tetapi saya pikir ini memang satu kewajiban bagi negara karena tetap berlaku adil ya. Artinya memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, jangan sampai mereka dicap terus ilegal tetapi karena ini negara tidak memberikan perhatian dan tidak memberikan solusi untuk masyarakat.

Maka oleh karena itu ini saya titipkan kembali kepada Pak Menteri dan jajarannya dalam rangka kita mengurangi ya, mengurangi *illegal mining* yang



dilakukan oleh masyarakat yang kita melihat mereka melakukannya hanya untuk kehidupan sementara bukan untuk kekayaan atau demi perut saja.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih kami kembalikan ke Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Baik, terima kasih Pak Willy.

Kayaknya persoalan *illegal mining* ini *nggak* berhenti-berhenti padahal Pak Menteri sudah bentuk ya kita ya Satgas Illegal Mining bersama Kejaksaan RI, Kepolisian walaupun masih tahapan harmonisasi ya Pak, betul, *Insha Allah* Pak Willy.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Izin, terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang saya hormati Pak Ketua, seluruh Anggota yang saya banggakan dan juga Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini.

Jadi yang pertama tentu terima kasih atas paparan yang telah diberikan kepada kami di Komisi VII dan apresiasi setinggi-tingginya, terima kasih Pak Menteri dan juga seluruh dirjen terkait atas terealisasinya beberapa program strategis yang sangat amat dinantikan oleh masyarakat, terkhusus di wilayah Gresik dan Lamongan. Kemarin saya turut andil dalam memonitor pelaksanaan dan implementasi dari beberapa program strategis tersebut dan sangat amat disambut baik oleh masyarakat di sana, mulai dengan program PJUTS dan tentu mungkin bagi kita yang sangat terbiasa dengan listrik yang selalu menyala, bagi masyarakat yang ada di daerah terkhusus di pelosok yang sampai hingga hari ini walaupun di Pulau Jawa tapi masih mengalami keterbelakangan ketika berbicara mengenai listrik.

Nah ini sangat-sangat amat membantu masyarakat dan juga program BPBL tentunya untuk ribuan masyarakat hingga 3.316 dan juga *converter kit* nelayan dan petani, ini sangat luar biasa disambut sangat baik oleh masyarakat. Maka terima kasih aspirasi kami telah didengar oleh kementerian dan semuanya berjalan dengan lancar.



Poin kedua sebetulnya poin kedua dan terakhir untuk kali ini adalah berkaitan mengenai progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023, berkaitan mengenai program konversi motor listrik. Di sini disampaikan bahwa target awalnya adalah 350 motor dan hingga hari ini di bulan November tercatat dengan ketersediaan 350 unit, proses konversi saat ini masih berjalan di mana 60 unit telah terkonversi. *Nah* pertanyaan saya adalah kendala apa saja selama ini dialami maka kemudian di mana progresnya itu tidak maksimal, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi apa namanya masih, masih berproses dan cukup jauh dari target yang sudah ditentukan.

Saya juga mendapatkan informasi bahwa sedang dilakukannya revisi Perpres 55 Tahun 2019 kalau tidak salah mohon dikoreksi jika salah, tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Mohon penjelasannya kepada kami apa saja yang kemudian tertera di dalam peraturan baru, mungkin *key*-nya saja agar kami juga memahami dari segi konversi ini ataupun percepatan dari apa transisi yang saat ini sedang kita ingin lihat hadir di negara Indonesia, itu gambaran besarnya seperti apa *gitu* karena ketika berbicara mengenai kendaraan listrik ini kan juga sesuatu satu hal yang selama ini sudah kita advokasikan dan kita dorong dan justru kami apresiasi karena selama ini dengan hadirnya KTT, beberapa Konferensi Tingkat Tinggi hingga juga sekarang banyak sekali *public transportation* yang menggunakan mengoptimalkan listrik *gitu* ya.

Nah maka kami mohon sekali penjelasannya agar *clear* dan jika ada hal-hal yang bisa kita bantu, ada hal-hal keputusan-keputusan politik yang harus kita tentukan Komisi VII siap untuk mendukung.

Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra, Pak Ramson sudah ya.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Saya Pimpinan, PDI satu lagi.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Oh iya sebentar.

Baik, karena Pak Ramson sudah saya wakilin sedikit Pak Menteri. Saya pertama ingin mengomentari terkait serapan anggaran yang tersisa 1 bulan



efektif karena kita tahu bahwa APBN 2023 akan tutup secara riil itu 31 Desember, tapi pembukuan diperkirakan maksimal tuh 20 September eh Desember.

Jadi saya pikir dengan sisa yang waktu yang sedemikian sempit, kita berharap serapan anggaran ini bisa dimaksimalkan Pak terutama untuk program-program yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung *kan*. Di dapil, kita semua ini rata-rata hampir semua Anggota DPR sekarang tiap hari di dapil. Sekarang kita melihat bahwa Kementerian ESDM itu di masyarakat sudah mulai nampak bahwa Kementerian ESDM itu bukan hanya pemberi izin tambang *kan*, adanya BPBL, PJUTS itu secara tidak langsung mengorbitkan bahwa Kementerian ESDM ini juga langsung bersentuhan dengan masyarakat di bawah *gitu*. Tadi apa yang disampaikan Mbak Roro itu betul.

Nah yang terakhir terkait alat masak itu juga, kami sampaikan bahwa itu program dari Pemerintah Presiden Joko Widodo dan ini melalui Kementerian ESDM, bukan dari lembaga lain. Lembaga lain hanya bantu memverifikasi, saya selalu tekankan ke masyarakat, pasang listrik gratis dari pemerintah *kan*, dari Pak Jokowi *kan*, termasuk *Magic Com* itu juga sama dari pemerintah Presiden Jokowi.

Jadi ya saya yakin bahwa masyarakat keberpihakan Presiden itu sangat nyata melalui Kementerian ESDM dan kita berharap serapan ini makin digenjut ya Pak Sekjen *kan*. Jadi hal-hal yang strategis karena *kan* kita tahu bahwa Kementerian ESDM beberapa waktu yang lalu mengalami sedikit guncanganlah, kita mengetahui psikologisnya. Untuk itu kami meminta supaya pekerjaan-pekerjaan strategis bisa dikoordinasikan dengan lembaga terkait agar terjadi kelancaran dan ada payung hukumnya itu.

Maka itu yang kedua adalah terkait pengelolaan batubara *kan* MIP ini, ini salah satu hal yang kita dukung melalui Komisi VII bahwa batubara potensi pendapatan salah satu yang tertinggi dari sektor minerba ini. Dan harapan kami dengan adanya MIP ini pengelolaan batubara ke depan jauh lebih bagus, tidak ada lagi kelangkaan seperti dulu khususnya untuk pembangkit listrik. Namun Pak ada sedikit yang kami keluhkan juga, praktik-praktik nakal di bawah itu masih terjadi. Tadi apa yang disampaikan Pak Nasril, Pak Willy ini kami juga dapat surat ke komisi Pak di sekretariat. Ini hampir sama terjadi, saya berharap ini jangan sampai *entar* terjadi lagi seperti di Sulawesi Tenggara *kan*. Ini ada dugaan dokumen terbang atau apa penjualan dokumenlah istilahnya, ini marak lagi terjadi *tuh*. Jadi ada salah satu perusahaan ini tembusan aja saya karena ini suratnya kayaknya ke Pak Plt ya *kan*.

Jadi ada satu perusahaan di sini ada namanya PT Bumi Moler Kalteng, dia memiliki konsesi sebesar berapa ini 300 hektar dan diberikan RKAB sebesar 300.000 metrik ton ya. Kami dari laporan ini kami akan panggil nih, tadi apa yang dikeluhkan Pak Nasril *kan*, Pak Willy kami akan panggil melalui Panja Ilegal Mining bahkan kami akan tinjau langsung.

Tadi misalnya ada satu perusahaan yang tadi disebut Pak ini, lokasinya itu tidak memungkinkan terjadi industri pertambangan di situ *kan*, airnya katanya dangkal *kan*. *Nah* ini hampir sama, ini dapat 300.000 *kan*, 300.000 metrik ton Pak. Ini sebenarnya kategorinya tambang menengah, menengah kecil ya *kan* tapi kami kaget *trading*-nya ini luar biasa, Pak. *Trading*-nya itu hampir 1 hari itu dia mengirim satu tongkang dan berdasarkan sumber yang dilampirkan katanya ini dari Direktorat Mineral *eh* Batubara, per bulan 10 itu hampir setiap hari.

Tanggal 1 dia kirim 7,6 ribu, *eh* dua kali tanggal 1, tanggal 2 satu kali, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, terus ini setiap hari begitu hebatnya *kan*, satu hari satu tongkang, padahal ini kategori tambang kecil *kan*.

Nah ini yang harus kita tindak lanjuti Pak dan karena informasi yang dilaporkan di sini tadi kami baca ini suratnya ke sekretariat, Pak dan disampaikan bahwa perusahaan ini ada di konsesi HGU orang. *Nah* ini proses pemberian RKAB-nya gimana, ada di HGU orang tapi bisa keluar RKAB.

Harapan saya jangan terjadi lagi lah kayak Sultra *kan*, *entar* dikulik-kulik ternyata ada manipulasi, atau terjadi proses tindak pidana korupsi di sini *kan* karena proses perizinan. Saya berharap hal ini tidak membuka ruang lagi lah *kan*, saya sering koordinasi teman karena sistem perizinan inilah yang menjadi salah satu biang kerok *kan*, saya diskusi Pak Dirjen sampai kita bilang coba koordinasi apa dilakukan sistem supervisi lah dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya karena agar sistem itu benar-benar berjalan.

Nah untuk itu Pak Menteri, saya minta dengan sangat di sini terjadinya hal-hal ini ada dua perusahaan ini tadi termasuk tadi Pak Willy juga. Kami ingin tinjau langsung Pak, khususnya kepada Bu Lana kami minta data bahkan potret udaranya. Kami ada di dalam potret udara dari PT yang tadi itu, itu sama sekali *nggak* ada industri, *nggak* ada penambangan, ada bukaan sedikit. Jadi ini palsu-palsu kalau kata Pak Ridwan, tidak ada nambang tapi dokumennya jalan *gitu* loh ini terkait jaminan reklamasinya Pak, ini lokasi nambangnya di mana terus *gitu* loh.

Jadi harapan saya dua industri perusahaan ini kita minta datanya dan kita akan minta dihadirkan ke Panja Illegal Mining dalam waktu dekat dan kita akan minta supaya teman-teman yang ada di panja juga ikut turun ke sana memantau secara langsung, termasuk kami akan berkoordinasi dengan APH lain baik Kejaksaan Agung maupun Kepolisian RI itu karena praktik ini sudah sangat jelas *gitu* loh, sangat marak dan kami akan segera koordinasi Komisi VII *entar* sekretariat minta koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik Jamintel maupun Jampidsus, atau dengan Kabareskrim itu terkait dugaan pelaku hal ini.

Jadi mungkin itu saja dari kami Fraksi Partai Gerindra, selanjutnya PDIP kembali lagi.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan juga Anggota Komisi VII,
Yang saya hormati Pak Menteri ESDM beserta jajarannya.

Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri untuk kelancaran program-program untuk rakyat selama tahun 2023 ini, untuk Dirjen EBTKE, Dirjen Gatrik, Badan Geologi dan BPSDM untuk program-programnya yang langsung terkait dengan masyarakat.

Sebagai wakil rakyat tentunya kami sangat mengapresiasi program-program seperti ini, semoga kinerjanya dipertahankan tahun depan dan juga program-program ini dipertahankan Pak, tidak hanya sampai bulan April saja tapi bulan-bulan yang akan datang juga programnya makin banyak, karena program-program ini tentunya terbukti sangat bermanfaat sekali untuk rakyat.

Namun saya ada masukan untuk BPSDM Kementerian ESDM karena program-program yang untuk masyarakat ini menurut saya masih kurang, padahal di BPSDM sangat banyak program-program Bimtek, terus *workshop* dan sertifikasi untuk masyarakat, termasuk juga contoh sertifikasi kompetensi untuk para tukang bangunan yang bisa memasang instalasi listrik di rumah-rumah. Para tukang bangunan ini ternyata bisa mengikuti *workshop* yang diadakan oleh BPSDM di Indonesia ada lebih dari 27 juta tukang bangunan, tetapi yang hanya, yang ada, yang punya sertifikat hanya 600.000 saja.

Jadi ada usulan Pak kepada BPSDM jika memang sulit menemukan golongan masyarakat yang membutuhkan sertifikasi dan *workshop* seperti ini, tidak ada salahnya melibatkan kami sebagai Anggota DPR RI karena keseharian kami ini pasti berinteraksi dengan masyarakat Pak, apalagi di Brebes kami siap menerima Pak BPSDM karena jumlah penganggurannya sangat tinggi.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Ada satu lagi masukan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.



F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih Pimpinan, ada tambahan ini Pimpinan, maaf.

Pak Menteri saya mendapat informasi dari tim saya di lapangan, kami mohon karena terkait dengan *deadlock* ya di lapangan Pak. Sekarang *deadlock* kita di lapangan antara kepala daerah dengan kita karena apa? Karena kepala daerah mengaku bahwa itu program beliau dan kita sudah membuat langkah-langkah para masyarakat untuk mengajukan ke kita, justru saya diadakan ke partai karena dianggap saya menggunakan program pemerintah dengan menggunakan nama partai.

Jadi Pak Menteri tolong di inisiasi ini, *ditengarai* karena saya *nggak* tahu apa yang sudah dilakukan kepala daerah, saya *nggak* tahu hingga dia betul-betul mempertahankan bahwa itu adalah program mereka, anak Medan, tak jelas tapi kalau sudah terantuk menjerit dia, itu biasa anak Medan, ini belum terantuk dia masih saya biarkan sedikit aja, sedikit aja saya ulur.

Saya sedikit saya ulur dulu gitu cuman ini saya kira kementerian tolong hadir Pak di sana Pak, karena sudah *deadlock* di lapangan ya, khususnya konkrit nelayan sama petani, kalau BPBL *nggak* Pak, ya itu. Jadi sekarang sudah *deadlock* di lapangan kita tidak bisa buat apa acaranya lagi kegiatannya.

Yang terakhir lupa tadi untuk BPH Migas, Ibu di daerah saya itu masih banyak daerah yang jauh dari SPBU Ibu. Saya masih ingat ada program SPBU yang apa, penugasan untuk wilayah-wilayah khusus, apakah masih berlaku sampai saat ini Bu? Karena masyarakat saya itu terlalu jauh membeli BBM, SPBU-nya jauh sekali *gitu* loh itu apalagi pinggiran-pinggiran laut begitu ya. Jadi kita mohonlah apakah BPH Migas ada punya kebijakan kita buka SPBU apakah istilahnya di sana agar masyarakat bisa mendapatkan BBM lebih baik.

Saya kira itu aja Pak Menteri, terima kasih. Saya kembalikan Ketua.

F-PG (BAMBANG HERMANTO):

Izin Ketua, satu ya.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Bambang Her.

F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):

Pak Menteri, terkait dengan AML Pak. AML ini *kan* kelihatannya di lapangan sudah mulai ramai begitu. Saya pengen ada kejelasan Pak, tentang proses distribusinya, ini apakah langsung ke penerima atau nanti di apa namanya diserahkan dulu ke kita, atau seperti apa Pak. Jadi kalau langsung ke



penerima saya kira nanti ya kita nanti *nggak* akan kelihatan begitu Pak maksudnya Pak, begitu aja Pak Menteri.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, sudah Ibu-Bapak? sudah ya.

Baik, Pak Menteri saya ada satu titipan pertanyaan dan mohon klarifikasinya Pak. Ini saya mendapatkan Indonesian Nickel Report Agustus 2023 Pak, ini terkait *export* MHP. MHP yang dipertanyakan apakah nilainya itu 3.574 ribu dolar per ton atau 17.793 dolar per ton karena di pencatatan di kita ekspornya senilai 3.574, tetapi justru di destinasi penerima itu 17.793. Sekilas saya membaca ini ada indikasi transfer *pricing* Pak, tetapi sejauh mana mohon ininya Pak, mohon masukannya dari Pak Menteri.

Kedua Pak, mungkin saya dalam kesempatan ini agak berbeda dengan, izin Pak Mul, agak berbeda dengan Pak Mul posisinya mengenai Freeport Pak, terutama mengenai rencana perpanjangan dari Freeport karena saya tahu untuk persiapan investasi yang lebih besar ke depannya itu membutuhkan waktu. Sehingga membutuhkan kepastian dan kepastian itu tentu dalam bentuk perpanjangan kontraknya, sehingga memang saya dalam posisi ini bisa memahami apa komitmen yang akan diberikan oleh McMoran dalam hal ini untuk pengembangan ke depannya. Jadi dalam hal ini saya sih pada prinsipnya tentu dengan evaluasi yang ketat, terutama terkait pengembangan *smelter* yang akan, yang sedang dalam tahap penyelesaian itu bisa dilakukan evaluasi yang ketat.

Yang menjadi catatan saya dalam hal ini Pak, memang ini keputusannya nanti pada akhirnya *kan* ada di Menteri BUMN tetapi sebagai Bapak stakeholder juga juga penting adalah mengenai pengelolaan. Pengelolaan operasional, ada pengelolaan juga kontrol di bidang keuangan, ada kontrol di bidang SDM, ada kontrol di bidang *procurement*.

Saya kira ini harus di secara ketat jangan sampai juga nanti apa namanya negosiasi yang menjadi alot di situ, karena saya yakin nanti akan ada negosiasi terkait hal tersebut. Di mana kontrol itu sepenuhnya dikehendaki oleh teman-teman dari pihak ke Freeport, dalam hal ini Mind-ID sebagai *shareholder*.

Terakhir Pak opsi 10% yang ditawarkan, saya dari pandangan saya sebagai dengan latar belakang investment *banker* dulu Pak. Lebih banyak opsi itu bahkan terbuka aja Pak, *open call option gitu* Pak. Jadi tidak perlu mutlak di eksekusi segera karena satu opsi itu tentu akan memakan biaya dan ketika kalau kita sudah menjadi pemegang saham 61%, apapun investasi ke depan ya kontribusi kita 61% untuk modal ke depannya. Kalau memang belum memungkinkan dananya belum ada, atau memberatkan *balance sheet*-nya

Mind-ID ke depannya saya kira mungkin itu harus dipertimbangkan, tetapi dibiarkan aja terbuka sebagai *call option* sewaktu-waktu bisa dieksekusi.

Mungkin itu Pak masukan dari kami, kami persilakan Pak Menteri dan teman jajaran untuk bisa memberikan jawaban, tanggapan yang mungkin membutuhkan jawaban agak panjang silakan Pak nanti dikirimkan secara tertulis saja.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami coba untuk merespons semua tadi tanggapan sesuai dengan poin-poin pertanyaannya, pertama yang terkait dengan program MIP ini yang memang sudah kita harapkan nanti berjalan mulai Januari 2024. Memang masih ada beberapa perangkat-perangkat aturan dukungan yang memang harus kita siapkan ya dan itu saja Pak Nasir, Nasir tadi sudah menyampaikan ya nanti mungkin pada saatnya akan kami sampaikan draf poin-poin ini dalam bentuk laporan tertulis nanti.

Jadi intinya MIP ini adalah untuk menjaga *fairness* dari apa *fairness* dari apa level *playing field* tadi katanya ya. Jadi semua itu juga mendapatkan tanggung jawab dan juga tanggung jawab bersama ya untuk bisa mendukung program pemerintah terkait dengan DMO *price*, (*Market Price Obligation*) yang mana 70 dolar untuk listrik ya dan kemudian juga 90 untuk pupuk dan industri lainnya.

Nah tadi sudah disampaikan ini akan diselesaikan dalam apa, nah kemudian HBA. HBA ini memang secara rutin kita berlakukan, kalau dulu tuh HBA itu dilakukan periodenya cukup panjang sehingga terdapat gap mengenai nilai HBA tersebut yang memang bisa menimbulkan disparitas level *price*-nya yang agak berbeda. Kalau sekarang ini sudah kita dekatkan yaitu prinsipnya bulanan kita *update*.

Kemudian juga pelaksanaannya adalah perbankan ini mekanismenya melalui perbankan dan memang kita meminta BUMN, Bank BUMN untuk bisa menjadi *lead*-nya di sini tiga Bank BUMN, yaitu Mandiri, BRI dan BNI dan di mana memang Mandiri memiliki kesiapan untuk bisa melakukan e-MIP-nya ya. *Nah* jadi inilah mekanisme yang *dashboard*-nya tadi yang sampaikan untuk ke Bank Mandiri. *Nah* kita berharap ya dengan kalau berjalan ini kita perlu memang melakukan sosialisasi yang kita harapkan sebelum *launching* operasional ini tahun, bulan Januari bisa dilaksanakan ya dalam bulan-bulan sesudah revisinya selesai ya, dalam bulan ini kita harapkan kita bisa melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada stakeholder-stakeholder yang terkait.

Kemudian yang kedua ini terkait mengenai anggaran ya, anggaran dari apa dari memang kalau dilihat baru progres dari realisasi pembayaran baru 59,03%, tapi yang lainnya ini tinggal hanya komitmen pembayaran ya dari

komitmen pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang sebagian besar ini sudah dilakukan.

PJUTS memang tidak terdapat di dalam 2024 ya kami sangat memahami perlunya ini, ya mungkin ya perlu sama-sama menyuarakan lagi untuk mengusulkan di APBNP di tahun 2024 ya, mudah-mudahan habis Februari sudah ada, sudah ada kans kita untuk bisa. Demikian juga untuk BPBL dan juga alat masak listrik ya yang memang responsnya juga sangat baik. Ya tentu saja program-program unggulan ini sebaiknya memang harus kita fokuskan ya untuk memang bisa diperkuat karena memang berkepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat ya setempat.

Nah mengenai *converter kit* ya memang sering salah sasaran yang mau dikasih *converter*-nya *nggak* ada perahunya ya, dikasih perahu *nggak* ada ikannya. Jadi biarlah sementara kita apa kita fokus dulu yang apa ya Pak Willy ya, kita fokus dulu untuk yang memang ada perahunya *kan* kali ya, mudah-mudahan Kalteng nanti bisa memanfaatkannya bisa lebih baik, tapi memang sangat dibutuhkan untuk menghemat ya. Menghemat biaya operasional nelayan ya, juga bisa menanggulangi dampak kekeringan pada saat musim kering ya bisa pakai juga pompa-pompunya itu untuk dipakai di untuk memompa air.

Memang PMN *nggak* tidak diberikan di 2024 ya karena mungkin disebabkan oleh sesuatu hal ya tidak ada lagi PMN untuk PLN di tahun 2024. Jadi apa yang saat ini, *nah* kemudian juga terkait dengan tadi yang pertanyaan tender dan non-tender itu. Kita memang ada program e-katalog, jadi memang dengan e-katalog itu kita bisa langsung memberikan. Jadi ini bisa lebih cepat dibandingkan dengan prosedur-prosedur yang sebelumnya dilakukan harus, harus apa melalui beberapa pemilihan beberapa sumber-sumber vendor berkompetisi karena dengan e-katalog ini mempunyai standar dan bisa langsung memesan barangnya dan kemudian ada program juga swakelola.

Jadi untuk Pak Hendrik nanti di Deli Serdang, Deli Serdang ini nanti kita akan coba sama-sama ya dengan tim kita untuk bisa menjelaskan kepada kepala daerah setempat ya, bagaimana program ini seharusnya udah bisa dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan oleh *dispute* ini *kan* jadi agak tertunda. Ini pasti masyarakatnya juga pasti akan apa terdampak.

Mengenai *illegal mining* ini memang masalah klasik ya dan memang kita perlu sama-sama Pak Ketua, ya untuk bisa bagaimana bisa mendatangi, memverifikasi ya. Kami sangat sangat, sangat berbesar hati ya kalau kami upaya yang selama ini lakukan memang belum efektif, tapi dengan dukungan nanti dengan dukungan dari Panja Illegal Mining di Komisi VII *Insya* Allah bisa kita.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Pak Menteri, sedikit.



Gimana kalau kami, kami *kan* ada panjangnya Pak *kan*, dalam waktu dekat kami akan lakukan kayak semacam FGD-lah antara Dirjen Minerba, Pimpinan Komisi VII dengan ini, dengan atau Kapoksi atau salah, inilah Anggota Komisi VII karena *kan* kita mitranya lain Pak *kan*. APH itu mitra Komisi III, kami sudah sedikit berdiskusi kalau FGD tidak ada apa-apa.

Jadi kami akan melakukan FGD untuk penindakan agar lebih cepat nih, Satgas ini *kan* masih ada di Kemenpolhukam katanya ya Pak. *Nah* untuk dalam waktu dekat kami akan melakukan semacam kayak FGD melibatkan Eselon 1 APH, dari Kejaksaan minimal Jam, dari Bareskrim Eselon 1-nya *kan*, jadi biar kita bareng-bareng dulu Pak, mengonsep apa yang kita mau tindak.

Kami pengawasan melekat berdasarkan Undang-Undang MD3 *kan*, jadi Pak Dirjen minimal kita nindak, nindak bareng *kan*. Kalau di Pemilu itu namanya Gakkumdu Pak, ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian *kan*. Bawaslu-nya itu dari sisi politiknya, maksud saya ini Dirjen Minerba teknisnya, Kejaksaan Agung entah salah satu Jam lah, entah Jamintel, entah itu Jampidsus atau dari Bareskrim *kan*, *entar* tindak lanjutnya biar bareng-bareng Pak *kan*. Jadi karena kami melihat ini kalau *nggak* serentak, politiknya *nggak* jalan *kan*, Pak Dirjen semangatnya *oke* lah *kan*, tapi dari dorongan politik kurang, hukumnya juga *nggak* sinergi antara satu sama lain *kan*, tapi kalau kita koordinasi bersama-sama, dari sisi politiknya kita dorong.

Jadi saya tadi sudah bicara Pak Ketua dalam waktu dekat mungkin minggu-minggu ini atau minggu depan lah kita akan lakukan FGD bersama Jam dan juga Kabareskrim lah itu.

Mungkin itu Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pimpinan, Pak Menteri.

Kalau RDP aja gimana Pimpinan?

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Kalau RDP Bang, jadi untuk kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang MD3 *kan* kita kalau sudah bukan mitra kita *kan* harus berkoordinasi *kan*, itu bisa dilakukan dalam rapat gabungan *kan*. Rapat gabungan itu dipimpin oleh Pimpinan DPR, jadi kita ya kalau emang ada usul itu kita akan diskusikan



dengan Pimpinan Komisi III dan juga Pimpinan DPR karena rapat gabungan *tuh* ya harus melibatkan banyak pihak Pak, *kan gitu*. Jadi ada Pimpinan DPR dan biasanya rapat gabungan itu di gedung Nusantara 1 ya kalau *nggak* salah, *eh* Nusantara 2 situ, *gitu* Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya tapi, izin Pimpinan.

Tapi kalau menunggu rapat gabungan atau FGD catatan kami anggarannya darimana? Kalau RDP kan kita bisa pakai anggaran komisi tanpa melibatkan APH untuk melakukan verifikasi dan sekaligus ya terhadap apa yang terjadi pada lokasi pertambangan itu. Namun kami serahkan kepada Pimpinan kembali nantinya.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Jadi yang dimaksud FGD, bukan FGD semacam rapat tapi kemasannya forum grup diskusi. Jadi bisa dilakukan di Kementerian ESDM, kami Komisi VII di undanglah untuk hadir *kan*, dari pihak Kepolisian juga ada di ini, *nggak* apa-apa kalau itu sih sifatnya koordinasi *kok*, dalam menyikapi maraknya *illegal mining* ini *gitu*.

Mungkin itu Pak Dirjen, jadi kami Komisi VII akan berdiri di belakang Pak Dirjen, kan untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan *illegal mining* karena *illegal mining* itu bukan hanya ini, tapi yang paling parah ini jualan dokumen *kan*. Mereka nambang *nggak kan, nah* ini yang paling yang ini yang kalau kata teman-teman **...(tidak ada suara 1.42.47-1.43.00)**.

Nah itu Pak, jadi kita berharap dengan adanya FGD ini minimal mengurailah benang kusut ini agar penerbitan RKAB ataupun memang betul-betul, jangan mereka keluar RKAB 1 juta, jualan aja RKAB, yang dirugikan negara loh, Jamreknya *nggak* ada. Mereka *entar* nambang di daerah, mana dokumennya di situ *gitu* loh. *Nah* ini yang kita pengen minerba ini benar-benar, Kementerian ESDM sudah paten nih Pak, rakyat di bawah *wah* Pak Menteri ini memang orangnya Pak Jokowi, paten *kan* bagi ini AML *kan*, pasang baru listrik *kan*.

Makanya saya tiap hari Pak, saya info bahwa pasang baru listrik PLN hanya yang pasang *kan*, itu anggarannya dari Menteri ESDM. Jadi itu bukan dari PLN, PLN hanya pasang, dapat order-nya lah *gitu kan*. Itu ide dari Kementerian ESDM.

Iya Pak silakan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):



Baik, Pak Pimpinan.

Jadi, memang ada baiknya ya dari Dumas-Dumas yang ada kita juga sekalian aja kita bisa melakukan verifikasi langsung di lapangan ya. Sekalian kita juga melihat praktik-praktik yang ada di sana, sekaligus juga kami dari minerba khususnya direktorat terkait ya mineral ataupun batubara akan mengevaluasi kembali semua daftar-daftar perizinan-perizinan yang sudah diberikan ya untuk di memang diverifikasi kebenarannya ya karena memang limbah, limbah pengelolaan izin dari daerah ke pusat ya ini memang demikian banyaknya ya, kita tidak sempat *men-screen* satu persatu.

Kalau sampai *screen* satu persatu akan menghambat yang lain juga yang apa, yang yang besar-besar. Jadi memang banyak ada memang mungkin *misleading* yang memang kita harus melakukan *housekeeping* ya untuk bisa melakukan pembenahannya ya. Jadi dari Dumas-Dumas ini kami sangat mengapresiasi dan coba kita juga nanti kita akan melakukan verifikasi langsung di lapangan, sekaligus juga kita melakukan *housekeeping* di *inhouse* ya *inhouse housekeeping*.

Kemudian yang terkait dengan sedikit lagi ya konversi motor listrik memang responsnya memang masih, kita sudah melakukan program pembinaan dari industri-industri pendukung. Beberapa komponen memang bisa dilakukan, kuncinya adalah ketersediaan baterai ya. Ketersediaan baterai listriknya yang memang, memang apa terbatas sekali ya harus ada kepastian mengenai keberadaan stok daripada baterai listriknya ya karena kita belum bisa bikin sendiri dan juga mengenai kebijakan TKDN.

Barangkali nanti karena kita sama-sama di Komisi VII, di mana ESDM, ada Perindustrian ini mungkin juga bisa diharmonisasikan ya bahwa TKDN untuk ini ada baiknya bisa di-*consider* ya, tapi memang juga itu harus ada *roadmap*, kapan memang bisa diproduksi di dalam negeri hingga kita bisa menggunakannya semaksimal mungkin.

Prioritas pokoknya untuk apa yang ada tersedia di dalam negeri, tapi memang baterainya yang *nggak* ada ya, *converter*-nya ada, motornya juga bisa. Kita tim kami sudah melakukan *door to door* ya, *door to door* ke perusahaan-perusahaan dan responsnya cukup baik. *Nah* kemudian lagi kita mau lagi pakai pola MLM ya, ya mau pakai pola MLM ya untuk bisa apa menarik dan sosialisasi yang penting dilakukan.

Mungkin ada Pak Kiai ada.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):

Iya saya mau bicara sedikit tambahan boleh Pak Pimpinan? Terima kasih.



Tenang bukan Caleg ini Pak Menteri jadi biasanya informasinya lebih asli daripada yang masih Caleg.

Jadi satu pengalaman Pak Menteri, pada waktu kami ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dan ketemu dengan Pak mantan dirjen dan ketemu Kajati juga, di situ sangat tragis. Teman-teman kita yang ada di kementerian ini sesuatu yang menurut saya tidak masuk di akal karena seharusnya proses-proses itu adalah proses tata usaha negara PTUN, tapi mereka dikriminalkan. Sehingga ini jangan sampai terjadi kembali.

Tadi yang dilaporkan oleh Pak Bambang saya kira kita semua hampir semuanya dapat itu Pak Menteri, dapat kita. Jadi Pak Dirjen juga biasa saya tengah malam mohon maaf Pak Dirjen, jam 11, jam karena saya kerja itu baru jam 12 sampai jam 3 pagi Pak baru kerja Pak, *nah* itu saya saya kirim laporan-laporan itu.

Nah untuk supaya di kementerian terutama yang eselon-eselon seperti Bu Lana ini tidak jadi apa namanya sasaran karena *kan* saya kan sangat tragis kemarin ketemu Pak Yuli di situ. Di mana kita lihat Pak Yuli adalah orang yang sangat bersih kalau menurut saya ya yang saya lihat waktu itu, itu juga ada di sana. *Nah* sehingga perlu ada keputusan menteri apa itu tata kerja atau bagaimana untuk pegangan yang di bawah karena kalau tidak, mereka yang di bawah ini kalau dia berbuat nanti salah ya kalau tidak berbuat juga kejadian seperti ini. *Nah* jadi pembiaran istilahnya karena toh kalau umpama saya keluarkan saya kok tak dapat apa-apa, kalau saya keluarkan nanti kalau ada apa-apa saya kena, akhirnya dilakukan pembiaran.

Nah ini yang terjadi saya lihat sekarang di apa namanya dokter ini Pak dokumen terbang, dokter dokumen terbang dan IUP-IUP yang sudah jelas-jelas tidak jalan tapi berproduksi, berproduksi karena oleh Bu Lana dikeluarkan RKAB-nya. Bu Lana juga *nggak* bisa tidak mengeluarkan RKAB *nggak* bisa, *wong* datanya lengkap kok tapi kenyataan di lapangan dia *nggak* kerja, dokumen terbang tadi, dokumennya saja dari RKAB itu dipakai oleh ilegal-ilegal.

Nah itu per hari itu kurang lebih yang sudah saya dapatkan 200.000 metrik ton per hari, bayangkan itu *kan* kali berapa itu PNBPN yang hilang. *Nah* ini adalah pembiaran, *nah* tapi kalau kita laporkan ke yang berwenang, ya sebentar pada saatnya, setelah itu hilang lagi karena ilegal ini paling gampang Pak. Kita *nggak* usah datang ke sana, bisa kita pakai apa namanya itu pakai *quadrone* atau apa itu namanya itu *hah? Drone*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Drone, sky map petanya langsung kelihatan tuh.

F-GOLKAR (Ir. H.M. RIDWAN HISJAM):



Nah itu dia, jadi jangan kayak yang di Malang itu Pak, pesawat empat itu *nggak* ada apa-apa jatuh sendiri *gitu*. Jadi pesawat kita ini *kan* biasanya *nggak* usah perang *kan* Pak, biarkan saja nanti jatuh. *Nah* terbukti kemarin di Pasuruan ada empat yang meninggal, *nggak* ada musuh Pak, jatuh sendiri Pak. *Nah* itu jadi kita pakai *drone*.

Ada datanya semuanya Pak, saya saja yang tidak perlu, **apalagi** Pak Willy ya punya datanya itu semuanya, jam berapa mereka kerja, jam berapa di apa namanya bongkar jalan, semua itu ada semua Pak, lengkap. *Nah kan ndak* jelas ini apa namanya aparat kita ini APH namanya itu ya, aparat penegak hukum ini. Ini barangnya ada, buktinya ada semuanya, satu-satunya ya *stop* izinnya, RKAB-nya *ndak* ada *stop*, tapi Bu Lana harus dikasih satu pegangan karena kalau tidak dikasih pegangan, dia bisa dituntut sama pengusahanya, apa dasarnya kok saya *ndak* dikeluarkan RKAB saya, semuanya memenuhi persyaratan.

Nah itu Pak Menteri usulan saya supaya kita ini semuanya selamat, jangan sampailah di kementerian mitra kita ini kejadian seperti kemarin dan itu sudah kita wanti-wanti sejak awal pada waktu ada PLH itu, itu kita sudah kasih tahu, awas hati-hati, ternyata kejadian semuanya.

Terima kasih Pak Menteri dan Pak Ketua menjelaskan saja, ini asli Pak Ketua bukan palsu-palsu.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi sedikit Pak Ketua, terkait Pak Ridwan Hisjam.

Pak Menteri, saya lihat di Kementerian ESDM tidak ada anggaran yang bisa yang bersifat operasional seperti itu ngecek, itu perlu ada anggaran seperti itu, kalau *nggak*, *nggak* jadi-jadi ada pemeriksaan itu. Jadi misalnya langsung udah ada kontrak dengan, yang *sky map* langsung ngecek apa, *drone*-nya langsung periksa *gitu*. Ini *nggak* ada saya cek anggaran yang seperti itu, jadi anggarannya selalu yang udah permanen semua ini. Ini agak repot juga padahal *kan* ada operasional untuk memeriksa seperti itu.

Terima kasih Pak Ketua, interupsi.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Baik, sedikit Pak Ketua izin.

Tadi menindaklanjuti menguatkan aja, jadi beberapa hari lalu kita tanggal 6 November kita sudah melakukan rapat dengan Pak Dirjen, Pak Menteri *kan*. Memang persoalan RKAB ini cukup pelik Pak, terlalu gampang diselewengkan, terlalu sulit industrinya berantakan *kan*. *Kan* kita beberapa waktu yang lalu banyak industri mengeluh ke Komisi VII menyampaikan bahwa ada beberapa *smelter* bahkan mematikan tungkunya karena kesulitan bahan baku.

Kita pernah diskusi ya Pak waktu itu, maka itu dan juga kedua terkait kasus yang menimpa sahabat-sahabat kita yang belum tentu bersalah karena kita *kan* asas praduga tak bersalah. Di Sulawesi Tenggara *kan* kita cukup prihatin, tapi kasus itu cukup memukul psikologis teman-teman di mineral khususnya. Bahkan kami sempat berdiskusi, berdialog dengan beberapa orang. Mereka hampir menyatakan, hampir mayoritas menyatakan mogok kerja, kalau ditekan minta berhenti.

Nah evaluator-evaluator ini adalah tulang punggung minerba. *Nah* kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Pak Irjen, Pak Plt., waktu itu kami sepakati Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Dirjen sudah menyampaikan hasil kesimpulan rapat kita tanggal 6 November, ini terkait dokumen RKAB ini. Jadi ini kayak simalakama digampangin diselewengkan, dipersulit ada industri yang terganggu. Bahkan sekarang evaluator-evaluator mulai ketakutan *kan*, jadi tingkat penyelesaian RKAB ini sangat lamban.

Nah untuk itu kami lakukan RDP tanggal 6 November, salah satu kesimpulan yang kami akan laporkan ke Pak Menteri, mungkin Pak Dirjen sudah atau kita masukkan kembali ini kesimpulan agar menjadi kesimpulan yang lebih kuat di tingkatan Pak Menteri. Bunyi kesimpulannya itu ini Pak, saya bacakan.

Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar Kementerian ESDM RI menindaklanjuti karena sudah pernah ada MoU-nya katanya, MoU dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan untuk melakukan pendampingan pelaksanaan prosedur guna meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Jadi Pak Kementerian ESDM sudah melakukan MoU, tinggal MoU-nya ditingkatkan di tingkatan Eselon 1-nya Pak *gitu*. *Nah* ini mungkin Pak Menteri kalau sepakat biar kita ulang lagi, kita masukkan lagi di kesimpulan ini *kan*. Di dalam undang-undang RDP dengan Raker itu lebih tinggi Raker *kan*, kalau keputusan tertinggi di DPR itu Paripurna Pak, tapi minimal Raker pengambilan keputusan tingkat 1.

Pak Menteri jika sepakat, saya usul Ketua untuk dimasukkan kembali yang kesimpulan tanggal 6 itu.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Ini Pak Menteri, saya hanya mendapat bau-bau kurang sedap tentang Cisem Pak mohon dijelaskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Silakan Pak Menteri, tadi yang belum terselesaikan plus tadi pertanyaan terakhir terkait Cisem.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi prinsipnya kami *nggak* keberatan dengan apa konten yang akan ditambahkan di dalam kesimpulan ya karena memang juga selaras dengan apa yang kita juga ingin dilaksanakan.

Mungkin semua tadi sudah kami respons dan ini dari Pak Gandung, ini terkait dengan Cisem. *Nah* baunya bau-bau yang *nggak* sedapnya nih kira-kira apa nih Pak Gandung, ya karena Cisem ini tahap satu sudah selesai, gas sudah masuk, kemudian yang *gas station*-nya ini juga dalam *finishing* untuk *metering*-nya dan kemudian dari kita rencanakan Batang ini bisa dilanjutkan dan bisa diselesaikan dalam, sampai target kita tuh sampai Kandanghaur Timur sehingga ter-*connect* gas ini sampai ke Cikampek untuk ke Pupuk Kujang karena sekarang untuk diketahui bahwa dengan tidak tersambung pipa ini masih ada gas yang *idle* di Jawa Timur yang produksinya meningkat yang belum bisa tersalurkan ya kurang lebih 100 mmscf/d yang cukup, cukup banyak.

Jadi manfaat yang dari sampai dengan Kendal ya sudah bisa langsung masuk ke industri, sehingga industri tidak lagi menggunakan CNG sehingga mereka bisa dapat penghematan karena *nggak* perlu ada ongkos dari apa kompresi untuk mengisi CNG. Kalau ada hal-hal yang lain nanti mohon bisa disampaikan ya untuk kita tindak lanjuti.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, saya ingin klarifikasi aja Pak.

Pelaksanaan Cisem ini *nggak* ada hambatan Pak ya, lancar? Sesuai prosedur dan sesuai aturan yang ada.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Semua sudah dan ada pendampingan juga.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Mungkin Pak Pimpinan kita akan mohon untuk diagendakan kita sekali lagi Kunspek, tapi yang betul-betul serius sebab bau-baunya semakin menyengat ini sehingga kita proyek yang besar jangan sampai justru membawa korban.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):



Silakan aja nanti diagendakan susulan pendalaman.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak, kalau sudah Pak Menteri sisanya nanti di ini tertulis saja Pak ya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kami akan lengkapi dalam jawaban kami tertulis.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Baik, Ibu-Bapak sekalian.

Dengan demikian kita masuk ke dalam pembacaan kesimpulan rapat untuk bisa tolong ditampilkan. *Nah* kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Selasa 21 November 2023.

1. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk dapat segera berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, guna mempercepat, terkaitnya dihilangkan saja, guna mempercepat realisasi pelaksanaan Mitra Instansi Pengelola atau MIP Batuara.

Bisa disetujui Ibu-Bapak? Setuju ya.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

2. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM RI dan seluruh jajaran Kementerian ESDM RI atas pelaksanaan program tahun anggaran 2023, khususnya yang berdampak langsung kepada masyarakat yang sudah terlaksana dengan baik dan Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian ESDM RI untuk dapat segera menyelesaikan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang masih belum terlaksana.

Setuju ya?



**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik.

3. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk mengajukan penambahan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, khususnya untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat di dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Saya kira ini penting ini, setuju ya Ibu-Bapak?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara langsung dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining Komisi VII DPR RI dan Plt. Dirjen menerba Kementerian ESDM RI dengan melibatkan aparat penegak hukum pada tingkat Eselon 1 terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktik *illegal* di dalam kegiatan pertambangan sebelum terbentuknya Satgas Illegal Mining.

Bisa setuju Ibu-Bapak, setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Kemudian nomor 5.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pak Ketua.

Untuk yang poin 4 ini apa kita itelalu teknis ya masuknya ya, soalnya tadi kalau saya menyimak pembahasannya yang disampaikan oleh Pimpinan dengan Pak Menteri itu *kan* kita baru dalam tahapan untuk berdiskusi di luar ruang rapat *gitu* loh, jadi *nggak* sampai yang begini *gitu*.

Coba dicermati lagi Pimpinan, Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara langsung dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining Komisi VII DPR RI dan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dengan melibatkan aparat penegak hukum pada tingkat Eselon 1 terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktik *illegal mining* dalam kegiatan pertambangan sebelum terbentuknya Satgas Illegal Mining.

Kalau diizinkan Pimpinan, kami ingin mengusulkan bahwa melakukan pengawasan dan penindakan secara langsung itu diganti dengan apa ya



kalimat yang lebih fleksibel *gitu* lah. Maksudnya ini kan kita tadi hanya tahapan untuk berdiskusi dulu *gitu* loh belum ada *action* Pimpinan, kalau menurut pemahaman kami begitu atau mungkin ini diganti untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut atau diskusi, atau bagaimana *gitu* karena tadi sama sekali belum membahas *action* sampai ke sini *gitu*.

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI VII (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Saya jelaskan ya Pak Menteri ya.

Jadi kami sudah berdiskusi dengan Pak Dirjen, Pak Menteri juga terkait Satgas Illegal Mining udah 2 masa sidang yang lalu mungkin *kan*. Bahkan sekarang ditarik di Menkopolhukam tak jelas juga tindak lanjutnya sampai sekarang *kan*, tapi praktik ini sudah mulai meluas lagi *kan*. Awal-awal itu *stop*, berarti harus ada tindakan konkret. Kami juga kemarin minta untuk dilakukan, kalau MoU terkait prosedur. Prosedur penerbitan *kan*, *kan* kasihan kami mendengar bahwa staf-staf hari ini diperiksa oleh Kejati, besok sore diperiksa oleh Polda. Besok sore diperiksa ini, ganti lagi diperiksa oleh Polres, atau diperiksa oleh tempat lain *kan*.

Nah mereka yang mungkin ya ada beberapa pihak yang memang pelaku, tapi ada juga mungkin yang mereka tidak tahu-menahu. Hal inilah yang sangat mengganggu, *kan* tadi saya bilang kayak simalakama perizinan RKAB ini, dipermudah diselewengkan, dipersulit industrinya mati.

Nah untuk itu agar jalan tengahnya adalah dilakukan pendampingan, tapi kami sepakat waktu rapat tuh Pak, pendampingan prosedur lah Pak bukan pendampingan teknis. Teknis tetap wilayahnya minerba *kan*, prosedur dalam artian sudah memenuhi kaidah hukum ya. Jadi suatu ketika kalau dipermasalahkan itu sudah dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Agung, misalnya pengacara negara ataupun Kepolisian.

Jadi saya pikir itu kasihan tapi terkait ini, terkait kenapa kami minta dilibatkan Eselon 1 *kan* karena Eselon 1 di tingkatan pusat. Jadi bukan lagi Pak Irjen, Pak Plt Dirjen dengan Kepala-kepala APH di daerah, tapi kita dengan Eselon 1-nya di sini, jadi kerja sama itu antara Eselon 1 *kan*. *Nah* ini kalau kita tidak lanjut, kami hanya bisa mengawasi *kan*, mengawasi karena tanggung jawab kami undang-undang *kan*, tapi penindakan kami *nggak* bisa. *Nah* penindakan inilah yang dilakukan oleh eksekutif yaitu Dirjen Minerba.

Dirjen Minerba pun *nggak* sanggup sendiri *kan* entar ada yang panggil lagi *kan*, makanya di ajaklah si tukang panggil ini bareng-bareng *kan*, Si tukang panggil, Si tukang ngawasi *kan*, Si tukang eksekusi. Eksekusinya eksekutif, yang ngawasinya DPR dari sisi politiknya *kan*, Si tukang panggilnya ya APH *gitu* lah kira-kira itu.

Jadi saya pikir karena Satgasnya ini belum tahu kapan terbentuknya *kan*, kita berharap praktik ini dalam waktu-waktu dekat karena makin marak. Itu laporannya banyak banget Pak *kan*, di Komisi VII ini banyak sekali. Makanya saya pikir untuk bertindak cepat saya dan Ketua Panjanya Pak Eddy ya, saya dengan Pak Eddy akan bekerja dengan teman-teman Anggota Komisi VII akan kami tindak lanjuti seluruh laporan itu, termasuk yang tadi Pak siapa, PT apa Pak? PT Josua *kan*. Terus ini lagi, ini ada PT AKT, terus PT apa ini lagi Bumi Mulia Kalteng ini dalam waktu dekat akan kami tindak lanjut laporan-laporannya.

Kami minta Bu Lana selaku Direktur Batubara kasih kami datanya, data produksinya, data foto udaranya *kan*, data ininya, data *trader*-nya juga dia ngapalannya berapa karena ini dasar pengapalannya sudah ratusan ribu *kan gitu* loh dengan perusahaan kapasitas kecil bisa mengapalkan segitu besar, ini ya menurut kami agak unik *gitu* loh. Makanya kami Panja Illegal Mining Pak Dirjen dengan Pak Jam dan Kabareskrim akan turun segera *gitu*.

F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Pimpinan, saya mau tambah sedikit Pimpinan. Iya Pimpinan izin.

Saya sangat mendukung poin 4 itu apapun tadi yang diminta oleh Ibu Ratna saya pikir juga kalau bisa mempertegas saja di situ. Jadi gini Pak Ketua, Pimpinan ya kita ini *kan* termasuk saya *kan* Panja Illegal Mining kita mau jujur aja apa yang sudah kita bisa lakukan *gitu*, yang sudah kita perbuat *gitu*. Bahasanya itu di depan mata kita yang namanya ilegal ini udah sangat jelas *gitu* ya, lalu apa fungsi dari panja ini *gitu* loh.

Saya ingin ini riil, kalau kita tunggu ya apa yang mau dibuat ini tentang Satgas itu, *wallahualam*. Jadi lebih bagus sekarang ini fungsi pengawasan kita dan Panja Ilegal ini kita *gitu* loh dan kita serahkan kepada yang lebih mampu untuk melakukan ini, yang tidak mampu silakan mundur *gitu* ya karena saya melihat ini sudah pembiaran yang cukup besar *gitu* ya di rezim ini *gitu*, termasuk kita di Komisi VII juga saya anggap rezim juga ya karena membiarkan *gitu* ya.

Nah untuk itu sekali lagi untuk Ketua Panja, apa yang telah ditulis ini tindak lanjuti, negara jangan kalah.

Terima kasih.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan.

Terima kasih penjelasannya tadi Bapak Pimpinan dan Pak Willy, saya juga masuk di Panja Illegal Mining dan saya juga sangat sepakat kalau ini tidak boleh dibiarkan sepakat Pimpinan. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kesimpulan Komisi VII DPR RI ini sifat mengikat dan jangan



sampai ada hal-hal yang di luar *job desk* kita itu bisa sampai mengemuka gitu loh.

Saya menggarisbawahi bahwa penindakan secara langsung itu sama sekali bukan wewenang kita, saya hanya ingin mengingatkan. Kalaupun misalnya kita menganggap bahwa unsur-unsur APH yang ada di daerah itu ada modus-modus pembiaran dan lain sebagainya, itu berarti mereka yang harus kita panggil melalui saluran-saluran yang baik begitu loh. Sehingga saya mengusulkan konkretnya untuk poin 4 untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining dan seterusnya.

Jadi unsur kata-kata penindakan secara langsung itu diganti atau dihapus begitu Pimpinan karena fungsi kita adalah mengawasi, untuk menindak itu sama sekali bukan ranah kita gitu loh. Jangan sampai niat baik kita untuk menjaga harta dan kekayaan bangsa Indonesia untuk mengurangi *illegal mining* dan sebagainya, peningkatan PNBPN dan seterusnya ini malah menjadi boomerang untuk kita sendiri karena kita *overlapping*.

Itu saja Pak Menteri, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sebenarnya itu dan menindaklanjuti, ya gini aja, untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti dalam waktu dekat, menindaklanjuti dalam waktu dekat, gimana Ibu-Bapak ?

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Setuju.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Untuk melakukan pengawasan secara langsung dan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, pimpinan ini sudah berlainan makna karena dalam konteks penindakan itu adalah di eksekutif. Artinya kita di sini memperkuat Panja Illegal itu, kesepakatan kita adalah dengan Menteri kita mempersilakan rekomendasi komisi agar Pak Menteri di-*backup* untuk melakukan penindakan. Penindakan oleh pihak kementerian yang didampingi oleh APH adalah paling tidak ya, paling tidak pencabutan *kan gitu*, sanksi administrasi dan sebagainya, tidak secara tindak pidana tapi rekomendasi kita adalah hanya. Rekomendasi kita hanya ditujukan kepada kementerian, kepada pemerintah, jadi penindakan itu penting Bu Ratna.



Terima kasih.

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Betul Bu Ratna, sedikit Bu Ratna.

Jadi kita lihat kalau Kepmen atau Permen ya itu pembekuan atau apa itu atas rekomendasi APH, jadi panja ini akan sia-sia kalau tidak dilakukan kerja bareng *kan*. Jadi saya kasih contoh terkait Gakkumdu Pak, Gakkumdu Pemilu itu ada tiga unsur di situ *kan*, pengawasannya dari Bawaslu memang tapi penindakannya dari tempat lain Pak, tapi jadi satu *kan*.

Ini hampir sama antara eksekutif penindakan, perizinan itu dari kementerian *kan*, tapi kementerian tidak bisa melakukan tindakan semena-mena pasti Bu Ratna *nggak* bakal berani kalau tidak ada dasar hukumnya, biasanya *kan* permintaan betul ya Bu ya di Kepmen ada, pembekuan izin atau apapun itu harus ada dasarnya yaitu permintaan dari APH, maka itu kita bungkus jadi satu kesatuan *kan*, wilayah pengawasan kita *kan*, wilayah penindakan eksekutif bersama yudikatif itu, Pak.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, kalau memang maksudnya demikian berarti itu harus dipisah Pak karena ini sangat substansi kalau menurut saya, mana yang ranahnya kita, mana yang ranahnya eksekutif *gitu* loh. Jadi biar *nggak* terjebak dalam, kalau pemahaman saya Pak, kalimat semacam ini tu arahnya ke pidana, pemahaman saya ya. Jadi mohon terutama tim TA komisi lah coba dirumuskan ini kalau misalnya terpisah seperti apa, mungkin bisa poin 4, poin 5 yang isinya itu *gitu loh*, jangan dijadikan satu semacam ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya saya sih pribadi kalau melihat kalimatnya sesungguhnya penindakan itu sudah termaktub di dalam keterlibatan aparat penegak hukum *gitu* loh. *Nah* itu jadi menurut saya kalau ini, ini pemahaman tolong dikoreksi teman-teman anggota. Kalau kita meniadakan kata penindakan *toh* apa namanya aspek penindakan itu sudah termaktub di dalam keterlibatan aparat penegak hukum yang ada di sini itu.

Itu mungkin pandangan saya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin usul, usul, usul untuk kalimat ya.



Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining Komisi VII DPR RI dan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI titik. Sesuai hasil pengawasan tersebut akan memberikan rekomendasi untuk dilaksanakan penindakan secara langsung dengan melibatkan aparat penegak hukum pada Eselon 1 dan seterusnya.

Kalau menurut kami itu sudah *firm*, jadi kita bisa melaksanakan apa yang tadi diinginkan oleh Bapak-bapak dan kita juga bisa istilahnya membedakan mana yang tugas legislatif, mana yang tugas eksekutif, demikian.

Mungkin bisa minta pendapatnya Pak Menteri, disetujui atau *nggak*.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik terima kasih Bu Ratna, Bapak Pimpinan.

Ini *kan* prinsipnya bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah pengamanan bersama ya, jadi memang tugas kami di eksekutif itu di depan kita memang dilengkapi dengan aturan-aturan yang memang sudah menjadi acuan. *Nah* yang terjadi di lapangan adalah untuk penindakan ini sendiri kami masih kekurangan *power*. *Nah* untuk itu dengan ada *encouragement*, *endorsement* dari Komisi VII berupa pengawasan langsung bersama, kemudian membuat ada rekomendasi ya, ada rekomendasi dan untuk ditindaklanjuti ya ditindaklanjuti oleh memang aparat ya, oleh aparat yang memang berwenang untuk melaksanakan eksekusi hukumnya.

Jadi prinsip, prinsip kebersamaan untuk bisa melakukan ini sangat juga merupakan suatu dorongan buat kita ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Iya, izin *gitu* aja Pimpinan jadi *nggak overlapping* kita.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA):

Jadi gini Bu Ratna ya Pak Menteri, Pak Menteri ini yang saya tangkap dia sepakat kan dengan kata ini karena untuk penguatan kan, karena sebenarnya di Ditjen Minerba ini sudah ada PPNS Penyidik Pegawai Negeri Sipil betul ya Pak ya? Cuma mereka melakukan penyidikannya harus ngikutin Perkap. *Nah* jadi mereka tidak serta-merta kita tentang PPNS-nya bareng-bareng, mereka punya hak eksekutif untuk melakukan penindakan cuma *power*-nya kurang kalau kata Pak Menteri tadi ya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Bisa dibaca begini karena fungsi dari Komisi VII adalah pengawasan dan fungsi eksekusi ada di eksekutif, sebetulnya kata-kata itu sudah juga, sudah



bisa juga di apa dispesifikasikan. Jadi *kan* kita bersepakat Komisi VII sesuai dengan fungsi pengawasannya dan ESDM sesuai dengan fungsi eksekusinya.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Setuju.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Izin Pimpinan, saya sepakat dengan Ibu Ratna, Pak.

Kalau saya mengamati kata ini, ini ada dua tindakan, yang satu pengawasan dan penindakan secara langsung. Itu dalam satu kalimat sehingga kalau kita baca begini, pertanyaannya siapakah yang melakukan pengawasan dan penindakan? Panja *kan* begitu, bersama *bla bla bla bla*.

Nah Bu Ratna menginginkan dan termasuk saya menginginkan, kita tempatkan posisi panja sebatas pada pengawasan. Sebenarnya penindakan dilakukan oleh menteri dengan PPNS-nya, ini pun lemah ditambah APH *kan gitu*, di penindakan. *Nah* sebenarnya itu walaupun yang Pak Menteri sampaikan ya bisa menafsirkan *gitu*, tapi kalau orang awam yang *nggak* ikut rapat ini, ini panja juga melakukan penindakan ini. *Nah* itu di luar kewenangan kita, makanya saya setuju dipisah aja pengawasan, lalu rekomendasi keluar, tindak lanjut *gitu*.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya tadi saya tadi juga menyampaikan begitu ya apa namanya karena aparat penegak hukum sudah tercantum di butir nomor 4, sehingga itu *kan* fungsinya adalah melakukan penindakan. Jadi kalau saya boleh usul kembali lagi teman-teman sekalian, kita *delete* kata penindakannya secara langsung ya. *Nah* Kalaupun kita mau jadikan itu tetap satu butir kesimpulan, *nah* nanti ditambahkan dengan melibatkan aparat penegak hukum pada tingkat Eselon 1 untuk pelaksanaan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga, iya untuk pelaksanaan penindakan *gitu* ya, jadi itu hapus.

Nah terus setelah pengawasan dalam waktu dekat melalui Panja Illegal Mining ya terus dengan melibatkan aparat penegakan hukum pada tingkat Eselon 1 untuk *nah* melaksanakan penindakan terhadap *gitu* itu ya, setuju ya, sepakat ya?

Baik, kalau *gitu* kita sepakat.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**



5. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM RI agar Kementerian ESDM RI menindaklanjuti MoU dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pendampingan pelaksanaan prosedur guna meningkatkan kelancaran tata kelola pertambangan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

Ini yang tadi kita, ini yang lama kita apa kita cantumkan lagi untuk penguatan, setuju ya Ibu-Bapak? Baik

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

6. Komisi VII DPR Ri meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 29 November 2023.

Setuju Pak Menteri? Baik.

**(RAPAT : SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, demikian Ibu-Bapak sekalian.

Rapat telah kita selesaikan dan sebelum kita tutup kami minta Pak Menteri untuk memberikan sambutan penutup.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas semua masukan ya maupun dukungan yang tadi telah disampaikan, yang semuanya adalah berupa masukan yang sangat positif ya yang bisa mendorong kinerja dari kementerian kami.

Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan tentu saja isu-isu yang spesifik tadi nanti akan kami sampaikan dalam jawaban kami secara tertulis. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam melaksakan tugas-tugas kita, amin, kabul.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Baik, Ibu-Bapak sekalian.

Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota Komisi VII pada Rapat Kerja dengan Menteri ESDM pada hari ini dan dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, bersama ini kami nyatakan rapat kerja pada hari ini ditutup.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.15 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive-like mark.